



LAPORAN KEUANGAN

T.A 2024

AUDITED

Balai Besar KIPM Makassar

Alamat : Jalan Dakota Nomor 24, Makassar, 90242

Telepon : (0411) 4813452, 4813539, 555120, Faksimile : (0411) 555159

Laman : <https://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmmakassar>, Email : bkipmmakassar@kkp.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (Balai Besar KIPM Makassar) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited Tahun 2024 Kantor Balai Besar KIPM Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Besar KIPM Makassar.

Di samping itu, Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 6 Mei 2025

Plt. Kepala,



Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
NIP. 197705032006042002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
- VI. Lampiran dokumen pendukung



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM <https://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmmakassar> SUREL bkipmmakassar@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) Balai Besar KIPM Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 6 Mei 2025

Pt. Kepala,



[Handwritten signature]
SP. Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
NIP. 197705032006042002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.796.568,700,00 atau mencapai 105 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp3.627.065.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.796.568,700,00 atau mencapai 105 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.892.550.118,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.185.994.000,-. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp6.989.045.120,- atau 99,92 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp.6.994.812.000,-, Belanja Barang sebesar Rp5.214.266.960,- atau 95 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp.5.499.838.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp689.238.038,- atau 99,69 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp691.344.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1				
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
				(dalam rupiah)
Uraian	TA 2024		TA 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara				
PNBP	3.627.065.000	3.796.568.700	3.604.250.000	4.129.156.575
Jumlah Pendapatan Negara	3.627.065.000	3.796.568.700	3.604.250.000	4.129.156.575
Belanja Negara				
Belanja Pegawai	6.994.812.000	6.989.045.120	13.459.161.000	13.451.331.199
Belanja Barang	5.499.838.000	5.214.266.960	7.276.530.000	7.250.780.617
Belanja Modal	691.344.000	689.238.038	58.000.000	57.803.250
Jumlah Belanja Negara	13.185.994.000	12.892.550.118	20.793.691.000	20.759.915.066

NERACA

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.942.638.534,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp80.272.481,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.862.366.053,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp102.748.861,- dan Rp26.839.889.673,-. Ringkasan Neraca pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2				
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Rp)	(%)
Aset				
Aset Lancar	80.272.481	106.530.981	- 26.258.500	-25
Aset Tetap	26.862.366.053	36.700.298.766	- 9.837.932.713	-27
Jumlah Aset	26.942.638.534	36.806.829.747	- 9.864.191.213	-27
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	102.748.861	576.281.918	- 473.533.057	-82
Jumlah Kewajiban	102.748.861	576.281.918	- 473.533.057	-82
Ekuitas				
Ekuitas	26.839.889.673	36.230.547.829	- 9.390.658.156	-26
Jumlah Ekuitas	26.839.889.673	36.230.547.829	- 9.390.658.156	-26
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	26.942.638.534	36.806.829.747	- 9.864.191.213	-27

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.779.478.000,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp12.972.821.479,- sehingga terdapat Defisit/Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp9.193.343.479,-, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit/Surplus-LO sebesar Rp9.193.343.479,-

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	(dalam rupiah)			
	Periode LO		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	(Rp)	(%)
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-8
PNBP	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-8
Beban Operasional	12.972.821.479	22.730.515.091	- 9.757.693.612	-43
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	- 9.193.343.479	- 18.634.318.515	9.440.975.036	-51
Kegiatan Non Operasional				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	28.657.349	- 28.657.349	-100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	28.657.349	- 28.657.349	-100
Pos Luar Biasa	-	-	-	0
Surplus (Defisit) LO	- 9.193.343.479	- 18.605.661.166	9.412.317.687	-51

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp36.230.547.829,- ditambah Defisit/Surplus-LO sebesar Rp9.193.343.479,- kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp85.454,- dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp197.400.131,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp26.839.889.673,-.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	(dalam rupiah)			
	Periode LPE		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	(Rp)	(%)
Ekuitas Awal	36.230.547.829	38.114.184.068	- 1.883.636.239	-5
Surplus (Defisit) LO	- 9.193.343.479	- 18.605.661.166	9.412.317.687	-51
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	85.454	15.214.246	- 15.128.792	-99
Transaksi Antar Entitas	- 197.400.131	16.706.810.681	- 16.904.210.812	-101
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	- 9.390.658.156	- 1.883.636.239	- 7.507.021.917	399
Ekuitas Akhir	26.839.889.673	36.230.547.829	- 9.390.658.156	-26

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Realisasi (Rp)
A. PENDAPATAN NEGARA	B.1				
1. PNBP Fungsional	B.1.1	3.627.065.000	3.778.008.000	104	4.093.285.000
2. PNBP Umum	B.1.2	-	18.560.700	100	35.871.575
Jumlah Pendapatan Negara		3.627.065.000	3.796.568.700	105	4.129.156.575
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	6.994.812.000	6.989.045.120	100	13.451.331.199
2. Belanja Barang	B.2.2	5.499.838.000	5.214.266.960	95	7.250.780.617
3. Belanja Modal	B.2.3	691.344.000	689.238.038	100	57.803.250
Jumlah Belanja Negara		13.185.994.000	12.892.550.118	98	20.759.915.066

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuanga

II. NERACA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Jumlah	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1.1	27.200.000	7.500.000
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	-	17.090.700
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	85.454
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	-	17.005.246
Persediaan	C.1.5	53.072.481	82.025.735
Jumlah Aset Lancar		80.272.481	106.530.981
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	20.345.060.000	23.674.412.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	18.809.622.744	23.527.067.070
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.115.277.600	11.651.848.924
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	217.041.650	229.490.850
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	74.086.555	74.086.555
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6	- 18.698.722.496	- 22.456.606.633
Jumlah Aset Tetap		26.862.366.053	36.700.298.766
Jumlah ASET		26.942.638.534	36.806.829.747
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang kepada pihak ketiga	C.3.1	102.748.861	576.281.918
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		102.748.861	576.281.918
Jumlah KEWAJIBAN		102.748.861	576.281.918
EKUITAS			
Ekuitas	C.4		
Ekuitas	C.4.1	26.839.889.673	36.230.547.829
Jumlah Ekuitas		26.839.889.673	36.230.547.829
Jumlah EKUITAS		26.839.889.673	36.230.547.829
Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.942.638.534	36.806.829.747

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	3.779.478.000	4.096.196.576
Jumlah Pendapatan		3.779.478.000	4.096.196.576
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	6.531.687.154	13.989.542.065
Beban Persediaan	D.2.2	467.187.986	737.531.929
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.988.323.207	3.953.233.341
Beban Pemeliharaan	D.2.4	991.944.533	1.123.200.968
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	857.579.147	1.475.004.584
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	1.136.099.452	1.451.993.204
Beban Lain-Lain	D.2.7	-	9.000
Jumlah Beban		12.972.821.479	22.730.515.091
Defisit (Surplus) dari Kegiatan Operasional	D.3	- 9.193.343.479	- 18.634.318.515
Kegiatan Non Operasional	D.4		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	-	32.959.999
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	-	- 4.302.650
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	28.657.349
Pos Luar Biasa	D.5		
Beban Luar Biasa	D.5.1	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		-	-
Surplus (Defisit) LO	D.6	- 9.193.343.479	- 18.605.661.166

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	TA 2024	TA 2023
Ekuitas Awal	E.1	36.230.547.829	38.114.184.068
Defisit (Surplus) LO	E.2	- 9.193.343.479	- 18.605.661.166
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	85.454	15.214.246
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	-	-
Lain-Lain	E.3.5	85.454	15.214.246
Transaksi Antar Entitas	E.4	- 197.400.131	16.706.810.681
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		- 9.390.658.156	- 1.883.636.239
Ekuitas Akhir	E.5	26.839.889.673	36.230.547.829

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar KIPM Makassar

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis**

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni:

- (1) penyusunan rencana,
- (2) penetapan rencana,
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
- (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,

(7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa,

(8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

(9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk :

(1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan

(2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor. Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan international, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen

akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Faktor-faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan, BKIPM melaksanakan 3 dari 4 misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu :

“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;

“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, melalui peningkatan

kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu :

Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;

Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKIPM.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Besar KIPM Makassar sebagai suatu hasil dan dampak dari

beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2020-2024, terdiri dari :

Sasaran Strategis 1. Industrialisasi KP yang berdaya saing;

Sasaran Strategis 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

Sasaran Strategis 3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar;

Sasaran Strategis 4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;

Sasaran Strategis 5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut :

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi

internasional;

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data; Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

***Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan***

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Besar KIPM Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Besar KIPM Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

***Dasar
Pengukuran***

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Besar KIPM Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Balai Besar KIPM Makassar. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal	100%

	Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
--	--	--

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan

akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Balai Besar KIPM Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan Revisi ke 22 dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024
Tabel.5

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.627.065.000	3.627.065.000
Jumlah Pendapatan	3.627.065.000	3.627.065.000
Belanja		
Belanja Pegawai	14.099.103.000	6.994.812.000
Belanja Barang	7.481.694.000	5.499.838.000
Belanja Modal	-	691.344.000
Jumlah Belanja	21.580.797.000	13.185.994.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp3.627.065.000,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.796.568.700,- atau mencapai 105 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.627.065.000,-. Adapun realisasi pendapatan Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.6

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	16.120.000	940.000	6
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	3.610.945.000	3.777.068.000	105
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		1.470.000	0
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu		17.090.700	0
Jumlah	3.627.065.000	3.796.568.700	105

Berikut penjelasan Pendapatan Negara Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2024:

-Pendapatan pengujian , sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya sebesar Rp3.777.068.000,-. pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Balai Besar KIPM Makassar berupa pengujian laboratorium dan sertifikat ekspor komoditi non hidup;

-Pendapatan jasa karantina perikanan sebesar Rp940.000,-. pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Balai Besar KIPM Makassar berupa pemeriksaan klinis komoditi hidup dan sertifikat ekspor komoditi hidup;

-Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp1.470.000,-. Pendapatan ini merupakan denda yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga atas keterlambatan dalam pekerjaan dan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak yaitu : Denda keterlambatan pekerjaan PT. Garda Jaya Mulya untuk pekerjaan belanja modal pengadaan alat Lab. Pengujian Mutu hasil perikanan sesuai SPK No. B.463/PP.PPK/BBKIPM.MKS/PL.420/XI/2024 Tanggal 8 November 2024, BAST No.B.784/PP.PPK/BBKIPM.MKS/PL.420/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.

-Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp.17.090.700,- ini merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai Balai Besar KIPM Makassar an Darul Aqsa yang melaksanakan tugas belajar pada tahun 2019 sd 2023 . Kelebihan atas pembayaran belanja pegawai dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

No.	TAHUN	Tunj. Umum	Tunj. Fungsional	TUKIN	TOTAL
1	2019	0	0	0	0
2	2020	0	2.880.000	0	2.880.000
3	2021	720.000	2.400.000	3.761.500	6.881.500
4	2022	2.520.000	0	3.009.200	5.529.200
5	2023	1.800.000	0	0	1.800.000
		5.040.000	5.280.000	6.770.700	17.090.700

Realisasi PNBPN tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.796.568.700,00,- dan Rp4.129.156.575,-. terdapat Penurunan sebesar 8,1 persen realisasi PNBPN tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya lagi penarikan biaya organoleptik stuffing karena sudah dialihkan ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Realisasi Pendapatan tahun 2024 dan 2023:

Tabel.7

URAIAN	2024	2023	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNBPN	3.796.568.700,	4.129.156.575,	(8)
Jumlah	3.796.568.700,00	4.129.156.575,00	(8)

Nilai Pendapatan pada LRA berbeda dengan pendapatan pada LO. Realisasi pendapatan pada LRA sebesar Rp3.796.568.700,- sedangkan Realisasi pendapatan pada laporan operasional adalah sebesar Rp3.779.478.000,- terdapat selisih sebesar Rp17.090.700,- ini disebabkan karena laporan operasional tidak memperhitungkan Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp17.090.700 yang terdapat pada LRA.

Berikut tabel perbandingan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional.

Tabel.7a			
Perbandingan Penyajian Realisasi Pendapatan LRA dan LO			
Uraian	LRA	LO	Selisih
Realisasi Pendapatan	3.796.568.700	3.779.478.000	17.090.700

Perbedaan nilai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional yaitu Pada Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai seluruh penerimaan negara pada Balai Besar KIPM Makassar sedangkan pada Laporan Operasional, Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan laporan kegiatan operasional dan laporan non kegiatan operasional. Selisih sebesar Rp17.090.700,00 merupakan pendapatan non kegiatan operasional dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu.

Pendapatan PNB (LO) harus sama dengan Pendapatan PNB (LRA) dikurangi Piutang PNB Awal Tahun ditambah Piutang PNB Akhir Tahun		Pendapatan PNB (LO) = Pendapatan PNB (LRA) - Piutang PNB Awal Tahun + Piutang PNB Akhir Tahun
RUMUS		
PENDAPATAN PNB (LO)	:	3.779.478.000
PENDAPATAN PNB (LRA)	:	3.796.568.700
PIUTANG PNB AKHIR TAHUN (NERACA)	:	0
PIUTANG PNB AWAL TAHUN (NERACA)	:	0
Selisih	:	17.090.700
penjelasan : Selisih disebabkan adanya Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu		

B.2 Belanja

**Realisasi
Belanja
Rp12.892.550.118
,-**

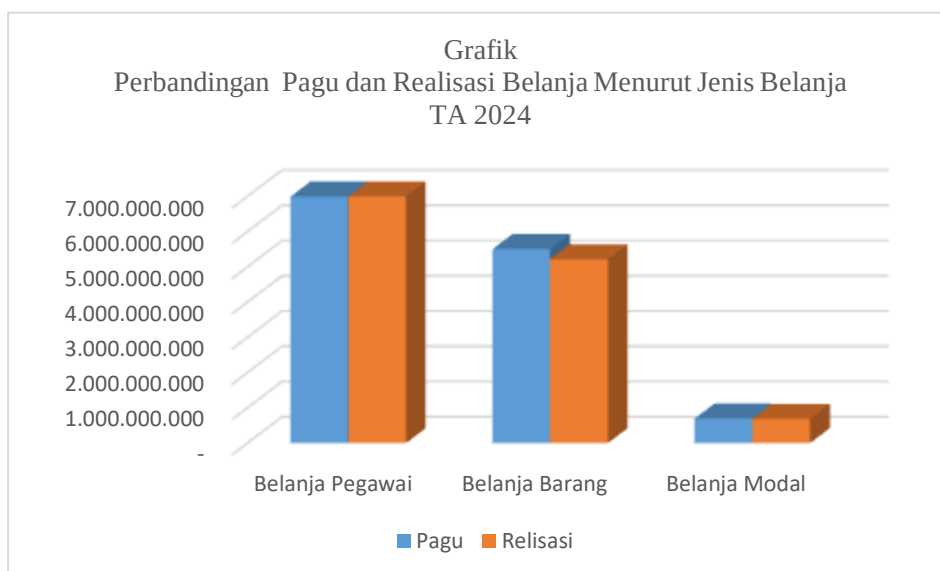
Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp12.892.550,- atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13.185.994.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.8
Realisasi Belanja Tahun 2024

URAIAN	2024				
	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase Anggaran
Belanja Pegawai	6.994.812.000,00	6.989.045.120,00	-	6.989.045.120,00	100
Belanja Barang	5.499.838.000,00	5.214.266.960,00	-	5.214.266.960,00	95
Belanja Modal	691.344.000,00	689.238.038,00	-	689.238.038,00	100
Jumlah	13.185.994.000,00	12.892.550.118,00	-	12.892.550.118,00	98

Realisasi anggaran tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp12.892.550.118,- dan Rp20.759.915.066,- . Realisasi belanja tahun 2024 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja pegawai disebabkan adanya peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia serta adanya penurunan anggaran untuk belanja Barang.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Berikut adalah Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023:

Tabel.9

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	6.989.045.120,00	13.451.331.199,00	(48)
Belanja Barang	5.214.266.960,00	7.250.780.617,00	(28)
Belanja Modal	689.238.038,00	57.803.250,00	1.092
Jumlah	12.892.550.118,00	20.759.915.066,00	(38)

Dari tabel diatas terdapat penurunan realisasi belanja pegawai sebesar 48 persen pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 hal tersebut disebabkan oleh adanya peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia sebanyak 59 pegawai terdiri dari 1 orang struktural, 44 orang fungsional PHPI, 10 orang Fungsional Inspektur Mutu, 1 orang Fungsional Pranata Komputer, 1 orang fungsional pranata keuangan serta 2 orang fungsional umum. Penurunan belanja barang sebesar 28 persen serta kenaikan belanja modal sebesar 1.092 persen.

Pada DIPA Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 terdapat 12 program prioritas Nasional. Berikut adalah 12 Program Prioritas Balai Besar KIPM Makassar dengan Pagu dan Realisasinya:

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Pagu Belanja	Realisasi	Persentase Penyerapan Anggaran
1	3989.PDC - Sertifikasi Produk	001 - Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	☒	92,860,000	92,722,998	99.85%
2	3989.PDC - Sertifikasi Produk	002 - Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	☒	37,140,000	36,389,980	97.98%
3	3989.PDF - Sertifikasi Lembaga	002 - Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	☒	185,000,000	132,135,925	71.42%
4	3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	☒	153,070,000	148,909,609	97.28%
5	3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	☒	48,000,000	47,963,269	99.92%
6	3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	002 - UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	☒	201,930,000	201,623,062	99.85%
7	3989.RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana Pengujian Mutu	☒	691,344,000	689,238,038	99.70%
8	7010.PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001 - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	☒	70,000,000	69,259,957	98.94%

9	7010.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	☒	56,500,000	53,057,377	93.91%
10	7010.PDD - Standarisasi Lembaga	002 - Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	☒	20,000,000	19,914,600	99.57%
11	7010.QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	☒	288,656,000	285,590,425	98.94%
12	7010.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	☒	6,500,000	6,138,575	94.44%

Untuk penyajian belanja pada LRA dan penyajian beban pada LO Terdapat perbedaan nilai penyajian. Kebijakan Akuntansi terkait Beban dan Belanja, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tahun 2024 adalah sebesar Rp6.989.045.120,- atau 99,99 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp6.994.812.000,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.451.333.199,- maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.462.286.079,- atau 92,46 persen.

Turunnya realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 disebabkan karena adanya peralihan pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia sebanyak 59 pegawai terdiri dari 1 orang struktural, 44 orang fungsional PHPI, 10 orang Fungsional Inspektur Mutu, 1 orang Fungsional Pranata Komputer, 1 orang fungsional pranata keuangan serta 2 orang fungsional umum..

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja pegawai TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.10					
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai					
TA 2024					
Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Belanja gaji dan tunjangan PNS	3.263.972.000	3.258.745.087	111.876	3.258.633.211	99,84
Belanja uang lembur	171.921.000	171.904.000	-	171.904.000	99,99
Belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito	3.558.919.000	3.558.573.443	65.534	3.558.507.909	99,99
Jumlah Belanja	6.994.812.000	6.989.222.530	177.410	6.989.045.120	99,92

**Belanja
Pegawai
Rp6.989.045.120,**

Untuk Belanja Pegawai Terdapat pengembalian uang makan senilai Rp111.000,- dan pengembalian tunjangan kinerja senilai Rp.65.534,-

Komposisi realisasi belanja pegawai TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Perbandingan antara realisasi belanja pegawai TA 2022 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.11				
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai				
TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	kenaikan/Penurunan	%
Belanja gaji dan tunjangan PNS	3.258.633.211	6.844.659.369	- 3.586.026.158	-52
Belanja uang lembur	171.904.000	393.859.000	- 221.955.000	-56,35
Belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito	3.558.507.909	6.212.812.830	- 2.654.304.921	-42,72

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir tahun 2024 adalah sebesar Rp5.214.266.960,- atau 95 persen dari pagu anggaran Rp5.499.838.000,- yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024. Terdapat pengembalian belanja barang pada TA 2024 senilai Rp300.000,- untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 maka realisasi belanja barang TA 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp2.036.513.657,- atau 28 persen. Adapun realisasi belanja barang TA 2023 adalah sebesar Rp7.250.780.617,- .

Penurunan nilai realisasi belanja barang pada TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terjadi karena ketersediaan pagu

Belanja Barang
Rp5.214.266.960,-

anggaran belanja barang juga menurun untuk TA 2024..

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja barang TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang					
TA 2023					
Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Belanja barang operasional	1.431.181.000	1.404.233.158	-	1.404.233.158	98,12
Belanja barang non operasional	110.321.000	107.594.605	-	107.594.605	97,53
Belanja barang persediaan	389.175.000	356.647.737	-	356.647.737	91,64
Belanja jasa	1.517.365.000	1.512.370.535	-	1.512.370.535	99,67
Belanja pemeliharaan	1.133.992.000	975.841.778	-	975.841.778	86,05
Belanja perjalanan dalam negeri	917.804.000	857.879.147	-	857.879.147	93,47
Jumlah Belanja	5.499.838.000	5.214.566.960	-	5.214.566.960	94,81

Komposisi belanja barang TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Perbandingan antara realisasi belanja barang TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel.13					
Perbandingan Realisasi Belanja Barang					
TA 2024 dan TA 2023					
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%	
Belanja barang operasional	1.404.233.158	2.407.208.000	-	1.002.974.842	-42
Belanja barang non operasional	107.594.605	248.817.000	-	141.222.395	-56,76
Belanja barang persediaan	356.647.737	757.192.000	-	400.544.263	-52,90
Belanja jasa	1.512.370.535	1.301.226.000		211.144.535	16,23
Belanja pemeliharaan	975.841.778	1.070.161.000	-	94.319.222	-8,81
Belanja perjalanan dalam negeri	857.579.147	1.491.926.000	-	634.346.853	-42,52
Jumlah Belanja	5.214.266.960	7.276.530.000	-	2.062.263.040	-28,34

B.5 Belanja Modal

**Belanja Modal
Rp689.238.038,-**

Realisasi Belanja Modal yang berakhir tahun 2024 adalah sebesar Rp689.238.038,- atau 99,7 persen dari pagu anggaran Rp691.344.000,- yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024. Tidak terdapat pengembalian belanja modal pada TA 2024. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, realisasi belanja modal TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp631.434.788,- atau 1.092 persen. Adapun realisasi belanja modal TA 2023 adalah sebesar Rp57.803.250,-.

Kenaikan relisasi belanja modal TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 antara lain disebabkan oleh jenis belanja modal.

1. Belanja modal TA 2023 adalah pengadaan peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair 16 unit sedangkan;
2. Belanja modal TA 2024 adalah pengadaan Hot Plate Stirrer (Alat Laboratorium Oceanografi), Personal Komputer, Printer, Evaporator, Tablet PC, Laptop, Desicator, Alat Laboratorium Penunjang Lainnya, Biological Safety Cabinet, Drying Oven, Meja Resepsionis, Balance Analitical Electric, Propipette, Lemari Kayu, serta Autocleve

Perbandingan pagu dan realisasi belanja modal TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.14					
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal					
TA 2024					
Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Belanja modal tanah	-	-	-	-	0,00
Belanja modal peralatan dan mesin	691.344.000	689.238.038	-	689.238.038	99,70
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	-	-	0,00
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	-	-	-	-	0,00
Belanja modal lainnya	-	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja	691.344.000	689.238.038	-	689.238.038	99,70

Perbandingan antara realisasi belanja modal TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.15				
Perbandingan Realisasi Belanja Modal				
TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja modal tanah	-	-	-	0
Belanja modal peralatan dan mesin	689.238.038	57.803.250	631.434.788	1092
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	-	0
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	-	-	-	0
Belanja modal lainnya	-	-	-	0
Jumlah Belanja	689.238.038	57.803.250	631.434.788	1092

B.5.1 Belanja Tanah

Tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja tanah pada DIPA tahun 2024, begitupun dengan TA 2023 tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja tanah.

B.5.2 Belanja Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp689.234.038,-*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp689.238.038,- yang berarti 99,7 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp691.344.000,-. Tidak terdapat Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp631.434.788,- atau 1.092 persen. Adapun realisasi belanja modal TA 2023 adalah sebesar Rp57.803.250,-. Kenaikan ini terjadi karena didukung ketersediaan anggaran untuk tahun 2024.

B.5.3 Belanja Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp0,-*

Tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan pada DIPA tahun 2024, begitupun dengan TA 2023 tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca atau posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Dibawah ini tabel analisis vertikal dalam neraca.

Aset = Kewajiban + Ekuitas	Aset		26.942.638.534,00
	Kewajiban		102.748.861,00
	Ekuitas	+	26.839.889.673,00
	Jumlah		26.942.638.534,00
	Selisih		-

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp80.272.481,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp80.272.481,- dan Rp106.530.981,-. Turun sebesar Rp26.258.500 atau 24,65 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel.16				
Aset Lancar				
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di bendahara pengeluaran	-	-	-	0,00
Kas lainnya dan setara kas	-	-	-	0,00
Belanja dibayar dimuka	27.200.000	7.500.000	19.700.000	262,67
Piutang bukan pajak netto	-	17.005.246	-17.005.246	0,00
Persediaan	53.072.481	82.025.735	-28.953.254	0,00
Jumlah	80.272.481	106.530.981	-26.258.500	-24,65

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di Bendahara
Pengeluaran**
Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Balai Besar KIPM Makassar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Bendahara pengeluaran Balai Besar KIPM Makassar telah menyetorkan :

- Setoran sisa UP RM 2024 tanggal 17 Desember 2024 ntpn 0532C45KQ6JHHF6M
- Setoran sisa TUP PNBK 2024 tanggal 31 Desember 2024 ntpn 8EAF397AC5AOL26
- Setoran sisa TUP RM 2024 tanggal 31 Desember 2024 ntpn 878E67NAPH18PL3A
- Setoran sisa UP PNBK 2024 tanggal 20 Desember 2024 ntpn 52532397AC21OQFJ

Bukti penyetoran sisa UP/TUP akan disajikan pada lampiran.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00*

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,-*

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun anggaran per tanggal Neraca.

Pada Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak Balai Besar KIPM Makassar per 31 Desember 2024 atau sebesar Rp0,-. Namun untuk tahun 2023 terdapat piutang sebesar Rp17.090.700,00. Piutang Bukan Pajak ini berasal dari kelebihan pembayaran belanja pegawai Balai Besar KIPM Makassar an Darul Aqsa yang melaksanakan tugas belajar pada tahun 2019 sd 2023. Kelebihan atas pembayaran belanja pegawai dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

No.	TAHUN	Tunj. Umum	Tunj. Fungsional	TUKIN	TOTAL
1	2019	0	0	0	0
2	2020	0	2.880.000	0	2.880.000
3	2021	720.000	2.400.000	3.761.500	6.881.500
4	2022	2.520.000	0	3.009.200	5.529.200
5	2023	1.800.000	0	0	1.800.000
		5.040.000	5.280.000	6.770.700	17.090.700

Dari rincian diatas ada 3 kategori kelebihan pembayaran atas belanja pegawai an Darul Aqsa yaitu Tunjangan Umum PNS, Tunjangan Fungsional PNS dan Tunjangan Kinerja.

Rincian Piutang Bukan Pajak secara Bruto dan Neto (setelah dikurangi penyisihan) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel.17				
Rincian Piutang Bukan Pajak				
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Bukan Pajak	-	17.090.700	- 17.090.700	100
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	85.454	85.454	100
Piutang Bukan Pajak Neto	-	17.005.246	- 17.005.246	100

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp27.200.000,-

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp27.200.000,- dan Rp7.500.000,00. terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 19.700.000,-.

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Balai Besar KIPM Makassar atas belanja dibayar dimuka berasal dari belanja sewa digi Sign SLIM FLOORSTAND 55 INCH (SF55B) selama 4 bulan. Hal ini mengacu pada surat perjanjian No.B.852/PP.PPK/BBKIPM.MKS/PL.420/2024 tanggal 30 Desember 2024 Surat perjanjian disajikan dalam lampiran laporan keuangan di bagian memo penyesuaian. Sementara untuk belanja sewa atas gedung dan bangunan kantor pelayanana Wilker KIPM Pelabuhan

Penyeberangan Bangsalae Siwa untuk tahun 2024 ini tidak diperpanjang lagi karena telah diambil alih oleh Badan Karantina Indonesia.

C.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp53.072.481,- dan Rp82.025.735,-. Terdapat Penurunan sebesar Rp28.953.254,- atau 35,30 persen.

Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel.18				
Persediaan				
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Barang Konsumsi	24.608.835	43.683.574	- 19.074.739	-43,67
Bahan untuk pemeliharaan	2.207.000	96.900	2.110.100	2177,61
Bahan baku	26.256.646	38.245.261	- 11.988.615	-31,35
Suku cadang	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Persediaan	53.072.481	82.025.735	- 28.953.254	-35,30

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Laporan persediaan Balai Besar KIPM Makassar tersedia pada lampiran.

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Balai Besar KIPM Makassar per 31 Desember 2024 berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan dan saldo menurut Laporan BMN adalah sebagai berikut

Persediaan
Rp53.072.481,-

Aset Tetap
Rp26.862.366.053,-

Perbandingan saldo menurut LK dan LBMN					
Per 31 Desember 2024					
No	Uraian	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih	Penjelasan selisih
1	Tanah	20.345.060.000	20.345.060.000	-	
2	Peralatan dan Mesin	18.809.622.744	18.809.622.744	-	
3	Gedung dan Bangunan	6.115.277.600	6.115.277.600	-	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	217.041.650	217.041.650	-	
5	Aset tetap Lainnya	74.086.555	74.086.555	-	
6	Akumulasi Penyusutan	- 18.698.722.496	- 18.698.722.496		
	Jumlah	26.862.366.053	26.862.366.053	-	

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.862.366.053,- dan perbandingan aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.700.298.766,- turun sebesar Rp9.837.932.713,- atau 26,81%.

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.345.060.000,- dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.674.412.000,- terdapat penurunan sebesar Rp3.329.352.000,- atau sebanyak 14,06%. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan asset ke Badan Karantina Indonesia.

Berikut adalah rincian lokasi dan luas tanah yang dimiliki oleh Balai Besar KIPM Makassar beserta nilai perolehannya.

Tabel.20			
Rincian Aset Tanah			
Per 31 Desember 2024			
Lokasi	Nilai		
Jl. Dakota No. 24	2.044.440.000		
Jl. Dakota No. 24 Sudiang	3.066.660.000		
Jl. Andi Djemma No.7	15.233.960.000		
Jumlah	20.345.060.000		

Berikut adalah rincian lokasi dan luas tanah yang beralih ke Badan Karantina Indonesia beserta nilai perolehannya.

Tabel.20			
Rincian Aset Tanah			
Per 31 Desember 2024			
No	Luas	Lokasi	Nilai
1	400m ²	Jenderal Sudirman Kota Pare-pare	738.108.000
2	418m ²	Jln Veteran Bone	540.434.000
3	300m ²	Jl. Tol Bandara Baru	1.013.580.000
4	307m ²	Jl. Tol Bandara Baru	1.037.230.000

Dibawah ini adalah analisis horisontal tanah Desember 2023

ANALISIS HORIZONTAL TANAH	
Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021	-
Penambahan (Penurunan)	(3.329.352.000)
Saldo Aset Tanah Per 31 Desember 2024	20.345.060.000
Saldo Aset Tanah Per 31 Desember 2023 (Saldo Awal 2024)	23.674.412.000
Selisih	3.329.352.000
Klarifikasi Selisih	Nilai
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp18.809.622.744,-

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.809.622.744,- dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.527.067.070,-. Terdapat penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.717.444.326,- atau 20,05 persen.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.21	
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin	
Per 31 Desember 2024	
Saldo Awal BMN	23.527.067.070
Mutasi Tambah	689.238.038
101 Pembelian	689.238.038
Mutasi Kurang	5.406.682.364
302 Transfer Keluar	5.406.682.364
Saldo Akhir	18.809.622.744

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan untuk TA 2024 sebesar Rp.6.115.277.600,- dan pada TA 2023 sebesar Rp11.651.848.924,-. Terdapat penurunan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.536.571.324,- atau 47,52 persen.

**Gedung dan
Bangunan
Rp6.115.277.600,-**

RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

Akun	Uraian	Jumlah
133111	Gedung dan Bangunan	6.115.277.600,
JUMLAH		6.115.277.600,

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2024 adalah sebesar Rp217.041.650,- dan TA 2023 sebesar Rp229.490.850,00. Terdapat penurunan pada nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.449.200,- atau 5,42 persen.

**Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp217.041.650,-**

RINCIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

Akun	Uraian	Jumlah
134112	Irigasi	66.238.000,
134113	Jaringan	150.803.650,
JUMLAH		217.041.650,

Aset Tetap Lainnya
Rp74.086.555,-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.086.555,- dan Rp74.086.555,- Tidak terdapat kenaikan dan penurunan pada nilai Aset Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel.23	
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya	
Per 31 Desember 2024	
Saldo Awal BMN	74.086.555
Mutasi Tambah	-
- -	-
Mutasi Kurang	-
- -	-
Saldo Akhir	74.086.555

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan. Dibawah ini merupakan analisis horisontal Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset ATL Per 31 Desember 2023(Saldo Awal 2024)	74.086.555
Selisih	-
Klarifikasi Selisih	Nilai
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	-
	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp18.698.722.496,-

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.698.722.496,- dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.456.606.633,-, turun sebesar Rp3.757.884.137,- atau 16,73 persen.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2024.

Tabel.24				
Akumulasi Penyusutan Aset tetap				
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	17.330.159.234	20.707.149.496	- 3.376.990.262	-16,31
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	1.306.884.115	1.689.534.682	- 382.650.567	-22,65
Akm. Peny. Irigasi	21.558.135	18.683.717	2.874.418	15,38
Akm. Peny. Jaringan	40.121.012	41.238.738	- 1.117.726	-2,71
Jumlah	18.698.722.496	22.456.606.633	- 3.757.884.137	-16,73

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp102.748.861,- dan Rp576.281.918,- turun sebesar Rp.473.533.057,- atau 82,17 persen. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.25				
Kewajiban Jangka Pendek				
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	102.748.861	576.281.918	- 473.533.057	-82,17
Jumlah	102.748.861	576.281.918	- 473.533.057	-82,17

Kewajiban Jangka Pendek
Rp102.748.861,-

Utang kepada pihak ketiga
Rp102.748.861,-

C.4.1. Utang kepada pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp102.748.861,- dan Rp576.281.918,- turun sebesar Rp.473.533.057,- atau 82,17 persen dari 31 Desember 2023. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian utang kepada pihak ketiga per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.26				
Utang Kepada Pihak Ketiga				
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Uraian Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	82.652.900	540.010.866	- 457.357.966	100,00
Belanja barang yang masih harus dibayar	20.095.961	36.271.052	- 16.175.091	-44,60
Jumlah	102.748.861	576.281.918	- 473.533.057	-82,17

Pada tahun 2024 terdapat belanja pegawai berupa pembayaran tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kecukupan pagu anggaran belanja pegawai pada DIPA.

Berikut adalah penjelasan rincian atas saldo utang kepada pihak ketiga.

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp82.652.900,- berupa :

- 1) Tunjangan kinerja bulan Desember 2024 untuk 9 orang pegawai sebesar Rp65.627.150,-;
- 2) Tunjangan kinerja bulan Desember 2024 untuk 2 orang pegawai sebesar Rp9.895.150,-;
- 3) Tunjangan kinerja tambahan plt bulan november 2024 untuk 1 orang pegawai sebesar Rp3.412.800,-;
- 4) Tunjangan kinerja tambahan plt bulan Desember 2024 untuk 1 orang pegawai sebesar Rp3.412.800,-;
- 5) Kekurangan Tunjangan fungsional bulan Desember 2024 untuk 1 orang pegawai sebesar Rp305.000,-;

2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp.20.095.961,- berupa

- 1) Tagihan internet Desember 2024 sebesar Rp111.000,-
- 2) Tagihan telephone Desember 2024 sebesar Rp255.633,-
- 3) Tagihan listrik Desember 2024 sebesar Rp19.084.638,-
- 4) Tagihan PDAM Desember 2024 sebesar Rp644.690,-

C.4.2. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Rp0,-

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan utang yang timbul karena adanya transaksi – transaksi kwitansi atau tagihan yang belum diajukan SPM nya misalkan transaksi tersebut telah terinput dalam aplikasi SAKTI pada modul komitmen dan pembayaran namun belum diajukan SPM atas transaksi tersebut.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp26.839.889.673,-

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.839.889.673,- dan Rp36.230.547.829,-, turun sebesar Rp9.390.658.156,- atau 25,92 persen . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyediaannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

D.1 Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Balai Besar KIPM Makassar TA 2024 adalah sebesar Rp3.779.478.000,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak. Terjadi penurunan realisasi pendapatan operasional sebesar Rp316.718.576,- atau 7,73 persen bila dibandingkan dengan Pendapatan Operasional TA 2023 yaitu sebesar Rp4.096.196.576,-

Realisasi Pendapatan Operasional per jenis penerimaan TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel.27				
Perbandingan Pendapatan Operasional Balai Besar KIPM Makassar				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-7,732
Jumlah	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-7,732

Pendapatan Operasional
Rp3.779.478.000,-

Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp3.779.478.000,-

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode TA 2024 adalah sebesar Rp3.779.478.000,-. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode TA 2023 sebesar Rp4.096.196.576,- maka terjadi Penurunan sebesar Rp316.718.576,- atau sebesar 7,73 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari atas:

- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp3.777.068.000,-;
- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp940.000,-;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.470.000,-

Untuk Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp940.000,- masih

menggunakan akun 425332 yang merupakan penggunaan akun bersama yang ditarik oleh Badan Karantina Indonesia karena di akun tersebut masih terdapat pemeriksaan klinis yang ditarik untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak yang masuk di BPPMHKP.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis penerimaan periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel.28				
Perbandingan PNB Per jenis Penerimaan				
Periode TA 2023 dan TA 2022				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.777.068.000	4.052.030.000	- 274.962.000	-6,786
Jasa Karantina Perikanan	940.000	41.255.000	- 40.315.000	-97,721
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.470.000	2.911.576	- 1.441.576	-49,512
Jumlah	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-7,732

Balai Besar KIPM Makassar adalah suatu organisasi yang berbasis pelayanan berupa pelayanan pengujian dan penerbitan sertifikat mutu perikanan , sehingga Balai Besar KIPM Makassar mempunyai pemasukan PNB Perikanan yang rutin atau disebut PNB Perikanan fungsional. Penyetoran PNB Balai Besar KIPM Makassar ke kas negara dilakukan melalui ebilling . sejak tahun 2016 Balai Besar KIPM Makassar sudah tidak menerima PNB secara tunai.

Berikut data lalu lintas perikanan Balai Besar KIPM Makassar selama tahun 2024 yang memiliki nilai pungutan PNB sesuai PP 85 Tahun 2021.

- Lalu Lintas Ekspor berupa sertifikat;
- Lalu Lintas IMPOR berupa sertifikat;
- Pengujian Laboratorium.

D.2 Beban operasional

Beban Operasional
Rp12.972.821.479,-

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada Balai Besar KIPM Makassar untuk periode TA

2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp12.972.821.479,- dan Rp22.730.515.091,-. Saldo tersebut turun Rp9.757.693.612,- atau sebesar 42,92 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Operasional dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.

Tabel.29				
Rincian Beban Operasional				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	6.531.687.154	13.989.542.065	- 7.457.854.911	-53,31
Beban Persediaan	467.187.986	737.531.929	- 270.343.943	-36,66
Beban Barang dan Jasa	2.988.323.207	3.953.149.841	- 964.826.634	-24,41
Beban Pemeliharaan	991.944.533	1.123.200.968	- 131.256.435	-11,69
Beban Perjalanan Dinas	857.579.147	1.475.004.584	- 617.425.437	-41,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.136.099.452	1.451.993.204	- 315.893.752	-21,76
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	9.000	- 9.000	-100,00
Jumlah	12.972.821.479	22.730.431.591	- 9.757.601.112	-42,928

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp6.531.687.154,- dan Rp13.989.542.065,-. Saldo beban pegawai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.457.854.911,- atau sebesar 53,31 persen dari tahun sebelumnya.

Beban Pegawai
Rp6.531.687.154,-

Rincian Beban Pegawai Per Akun				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban gaji dan tunjangan PNS	3.258.938.211	6.842.859.369	- 3.583.921.158	-52,375
Beban uang lembur	171.904.000	393.859.000	- 221.955.000	-56,354
Beban tunjangan khusus dan belanja pegawai transito	3.100.844.943	6.752.823.696	- 3.651.978.753	-54,081
Jumlah	6.531.687.154	13.989.542.065	- 7.457.854.911	-53,310

RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TA 2024 MENURUT AKUN

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.328.423.800,
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.602,
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	197.980.450,
511122	Beban Tunj. Anak PNS	55.418.984,
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30.850.000,
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	170.709.000,
511125	Beban Tunj. PPh PNS	23.470.575,
511126	Beban Tunj. Beras PNS	126.010.800,
511129	Beban Uang Makan PNS	291.885.000,
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	34.160.000,
512211	Beban Uang Lembur	171.904.000,
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.100.844.943,
JUMLAH		6.531.687.154,

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp467.187.986,- dan Rp737.531.929,-. Saldo tersebut turun sebesar Rp270.343.943,- atau sebesar 36,65 persen dari tahun sebelumnya.

*Beban Persediaan
Rp467.187.986,-*

Tabel.31				
Rincian Beban Persediaan Per Akun				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban persediaan konsumsi	332.663.878	305.840.214	26.823.664	8,770
Beban persediaan bahan baku	134.524.108	431.691.715	- 297.167.607	-68,838
Jumlah	467.187.986	737.531.929	- 270.343.943	-36,655

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN 2024 MENURUT AKUN

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	332.663.878,
593131	Beban Persediaan bahan baku	134.524.108,
JUMLAH		467.187.986,

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2.988.323.207,-

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp2.988.323.207,- dan Rp3.953.233.341,-. Saldo tersebut turun sebesar Rp964.910.134,- atau sebesar 24,40 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel.32				
Rincian Beban Barang dan Jasa				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.124.590.339	1.893.154.486	- 768.564.147	-40,60
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.101.820	28.544.031	- 15.442.211	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.418.838	22.616.413	- 7.197.575	-31,82
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.064.000	252.696.000	- 172.632.000	-68,32
Beban Barang Operasional Lainnya	171.058.161	208.354.349	- 37.296.188	-17,90
Beban Bahan	84.202.550	216.223.203	- 132.020.653	-61,06
Beban Honor Output Kegiatan	3.400.000	8.160.000	- 4.760.000	-58,33
Beban Barang Non Operasional Lainnya	19.992.055	19.794.277	197.778	1,00
Beban Langganan Listrik	392.484.105	443.925.854	- 51.441.749	-11,59
Beban Langganan Telepon	5.514.672	15.356.776	- 9.842.104	-64,09
Beban Langganan Air	7.306.200	9.155.380	- 1.849.180	-20,20
Beban Sewa	107.500.000	137.412.220	- 29.912.220	-21,77
Beban Jasa Profesi	25.500.000	68.400.000	- 42.900.000	-62,72
Beban Jasa Lainnya	938.190.467	629.356.852	308.833.615	49,07
Beban Barang Operasional penanganan pandemi covid 19	-	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-	#DIV/0!
Beban Jasa penanganan pandemi covid 19	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	2.988.323.207	3.953.149.841	- 964.826.634	-24,407

RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL 2024 MENURUT AKUN

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.124.590.339,
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.101.820,
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.418.838,
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.064.000,
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	171.058.161,
521211	Beban Bahan	84.202.550,
521213	Beban Honor Output Kegiatan	3.400.000,
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	19.992.055,
522111	Beban Langganan Listrik	392.484.105,
522112	Beban Langganan Telepon	5.514.672,
522113	Beban Langganan Air	7.306.200,
522141	Beban Sewa	107.500.000,
522151	Beban Jasa Profesi	25.500.000,
522191	Beban Jasa Lainnya	938.190.467,
JUMLAH		2.988.323.207,

D.2.4 Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan
Rp991.944.533,-**

Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.991.944.533,- dan Rp1.123.200.968,-. Saldo tersebut turun sebesar Rp131.256.435,- atau sebesar 11,68 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel.33				
Rincian Beban Pemeliharaan				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	467.427.017	357.386.845	110.040.172	30,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508.414.761	712.601.351	- 204.186.590	-28,65
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	16.102.755	52.642.772	- 36.540.017	-69,41
Beban Persediaan Suku Cadang		570.000	- 570.000	-100,00
Jumlah	991.944.533	1.123.200.968	- 131.256.435	-11,686

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TA.2024 MENURUT AKUN

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	467.427.017,
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508.414.761,
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	16.102.755,
JUMLAH		991.944.533,

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp857.579.147,-**

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp.857.579.147,- dan Rp1.475.004.584,-. Saldo tersebut turun sebesar Rp617.425.437,- atau sebesar 41,85 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut.

Rincian Beban Perjalanan Dinas				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	670.068.147	802.649.492	- 132.581.345	-16,52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	131.061.000	259.773.500	- 128.712.500	-49,55
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota				
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota	56.450.000	35.200.000	21.250.000	60,37
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota		377.381.592	- 377.381.592	-100,00
Jumlah	857.579.147	1.475.004.584	- 617.425.437	-41,859

RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TA.2024 MENURUT AKUN

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	670.068.147,
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	131.061.000,
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.450.000,
JUMLAH		857.579.147,

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adapun beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp.1.136.099.452,- dan Rp1.451.993.204,00 Saldo tersebut turun sebesar Rp315.893.752,- atau sebesar 21,75 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.136.099.452,-

Tabel.35				
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Pemurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	902.889.974	1.162.611.076	- 259.721.102	-22,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	226.499.736	282.488.093	- 55.988.357	-19,82
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	6.709.742	6.894.035	- 184.293	-2,67
Jumlah	1.136.099.452	1.451.993.204	- 315.893.752	-21,756

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TA.2024
MENURUT AKUN**

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	902.889.974,
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	226.499.736,
591312	Beban Penyusutan Irigasi	2.874.418,
591313	Beban Penyusutan Jaringan	3.835.324,
JUMLAH		1.136.099.452,

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Beban penyisihan piutang tak tertagih Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 sebesar Rp.0,- dan tahun 2023 sebesar Rp9.000,00. Penyisihan piutang tak tertagih tahun 2023 ini berasal dari piutang belanja pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan umum pegawai an Darul aqsa Tahun 2023 dari nilai piutang sebesar Rp1.800.000,-

D.2.8 Surplus/Defisit Kegiatan operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Balai Besar KIPM Makassar pada TA 2024 dan TA 2023 mengalami defisit dari kegiatan operasional. Hal ini disebabkan pendapatan operasional lebih kecil dari pada beban operasional. Defisit Kegiatan Operasional untuk periode TA 2024 sebesar Rp.9.193.343.479,- dan TA 2023 Rp18.634.318.515,-.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

*Defisit dari Kegiatan
Operasional
Rp9.193.343.479,-*

Terjadi penurunan sebesar Rp.9.912.532.534,- atau 53,19 persen..
Rincian Defisit dari kegiatan Operasional disajikan dalam tabel berikut.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Operasional	3.779.478.000	4.096.196.576	- 316.718.576	-7,732
Beban Operasional	12.972.821.479	22.730.515.091	- 9.757.693.612	-42,928
Defisit	- 9.193.343.479	- 18.634.318.515	9.440.975.036	-50,664

D.3.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban pelepasan aset non lancar. Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode TA 2024 sebesar Rp.0,- dan untuk TA 2023 mengalami surplus sebesar Rp32.959.999,-. Untuk beban pelepasana Aset TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada TA 2024 dan TA 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel.37				
Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	32.959.999	- 32.959.999	-100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0
Defisit	-	32.959.999	- 32.959.999	-100

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 sebesar Rp.0,- sementara tahun 2023 sebesar Rp32.959.999,- yang diperoleh dari penjualan peralatan dan mesin barang bergerak yaitu 1 unit mobil dengan kondisi rusak berat dan 1 unit motor dengan kondisi rusak berat. Penjualan dengan menggunakan system lelang melalui KPKNL.

D.3.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari

*Surplus dari
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp0,-*

*Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp0,-*

Kegiatan Non Operasional Lainnya. Kegiatan Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2024 sebesar Rp.0,- dan untuk TA 2023 sebesar Rp.0,- sementara beban dari kegiatan non operasional lainnya Tahun 2024 sebesar Rp.0,- dan Tahun 2023 sebesar Rp4.302.650,-

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel.38				
Rincian Surplus/Defisit Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Periode TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Pemurunan	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-	0,000
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	4.302.650	4.302.650	100,000
Defisit	-	4.302.650	4.302.650	100,000

Saldo beban dari kegiatan non operasional lainnya adalah dari barang persediaan yang rusak/usang yang berupa sertifikat

D3.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah Surplus sebesar Rp.0,- dan Rp28.657.349,00.

TA 2024 tidak terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional sementara TA 2023. Surplus Kegiatan Non Operasional merupakan jumlah dari Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp32.959.999,- dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp4.302.650,-.

D.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

Nilai Surplus/ Defisit Laporan Operasional untuk periode TA 2024 sebesar Rp. 9.193.343.479,- dan TA 2023 sebesar Rp18.605.661.166,- nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.412.317.687,- atau 50,58 persen.

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp0,-

Defisit Laporan Operasional Rp9.193.343.479,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Balai Besar KIPM Makassar adalah kekayaan bersih Balai Besar KIPM Makassar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Balai besar KIPM Makassar pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dibawah ini merupakan analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	
Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas (+/-) Transaksi Antar Entitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir	: 26.839.889.673
Ekuitas Awal	: 36.230.547.829
Surplus/defisit LO	: -9.193.343.479
Koreksi	: 85.454
Transaksi Antar Entitas	: -197.400.131
Selisih	: 0
PENJELASAN	

Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2024
Ekuitas Awal	36.230.547.829,-
Surplus / Defisit – LO	(9.193.343.479,-)
Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas	85.454,-
Penyesuaian nilai aset	0
Koreksi nilai persediaan	0
Selisih Revaluasi aset	0
Koreksi nilai aset non revaluasi	0
Lain-lain	85.454,-
Trasnsaksi antar entitas	(197.400.131,-)
Kenaikan/ penurunan ekuitas	(9.390.658.156,-)
Ekuitas Akhir	26.839.889.673,-

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp36.230.547.829,-

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp36.230.547.829,- dan Rp38.114.184.068,-, terjadi penurunan sebesar Rp1.883.636.239,- atau 4,94 persen.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO
Rp9.193.343.479,-

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit senilai Rp9.193.343.479,- dan Rp18.605.661.166,00,00. Defisit LO Balai Besar KIPM Makassar merupakan penjumlahan selisih lebih antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
Menambah/Men
urangi Ekuitas
Rp85.454,-

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp85.454,- dan 31 Desember 2023 senilai Rp15.214.246,-. saldo koreksi TA 2024 senilai Rp85.454 ini berasal dari adanya koreksi atas Penyisihan Piutang tak tertagih.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
(Rp197.400.131)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 197.400.131,-) dan untuk periode 31 Desember 2023 adalah senilai Rp16.706.810.681,-. Nilai tersebut merupakan transaksi antara Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lain (Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain) serta antar unit di dalam Entitas Pelaporan itu sendiri maupun dengan Entitas Pelaporan lain (Transfer Masuk dan Transfer Keluar). Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebagian besar disebabkan adanya perpindahan aset berupa piutang pajak dan aset tetap dari satu instansi/satker ke instansi/satker lain. Adapun rincian transaksi antar entitas per akun dapat dilihat pada tabel berikut.

**RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**

Akun	Uraian	2024	2023	Naik/ Turun
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	12.892.550.118,	20.759.915.066,	-7.867.364.948,
313121	Diterima dari Entitas Lain	-3.796.568.700,	-4.129.156.575,	332.587.875,
313211	Transfer Keluar	-9.391.071.299,	0,	-9.391.071.299,
313221	Transfer Masuk	97.689.750,	76.052.190,	21.637.560,
JUMLAH		-197.400.131,	16.706.810.681,	-16.904.210.812,

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp26.839.889.673,-

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp26.839.888.673,- dan Rp36.230.547.829,-. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK**

*Temuan dan
Tindak Lanjut
Temuan BPK*

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut BPK atas Laporan Keuangan Balai Besar KIPM Makassar TA 2023 (Audited) dan TA 2024 tahun berjalan.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

*Pengungkapan
Lain-Lain*

F.2.1 Pengelola Keuangan

Berikut adalah Pengelola Anggaran pada Balai Besar KIPM Makassar TA 2024.

Jabatan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
Pejabat Pembuat Komitmen	Kamdani, S.Pi, MM
PPSPM	Karwit, S.Pi
Bendahara Pengeluaran	Jumhana, A.Md
Bendahara Penerimaan	Irma Syam

Lampiran Dokumen Pendukung

1. Surat Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN Desember 2024	2. Reviu Inspektorat Jenderal
3. Telaah Laporan Keuangan Tahun 2024	4. Cetakan Laporan Realisasi Anggaran (Aplikasi MonSAKTI)
5. Cetakan Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Aplikasi MonSAKTI)	6. Cetakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Aplikasi MonSAKTI)
7. Cetakan Neraca Face (Aplikasi MonSAKTI)	8. Cetakan Neraca Percobaan Kas (Aplikasi MonSAKTI)
9. Cetakan Neraca Percobaan AkruaI (Aplikasi MonSAKTI)	10. Cetakan Laporan Operasional (Aplikasi MonSAKTI)
11. Cetakan Laporan Perubahan Ekuitas (Aplikasi MonSAKTI)	12. Memo Penyesuaian
13. LPJ Bendahara Pengeluaran	14. LPJ Bendahara Penerimaan
15. DIPA TA 2024	16. RKALKL Rev Terakhir
17.	18.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 427598
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	13,185,994,000	13,185,994,000	0
2	Belanja	12,893,027,528	12,893,027,528	0
3	Pengembalian Belanja	-477,410	-477,410	0
4	Estimasi Pendapatan	3,627,065,000	3,627,065,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,796,568,700	3,796,568,700	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25



Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Ari / 15 Januari 2025
		Direviu oleh/Tanggal	Agus / 15 Januari 2025
		Disetujui oleh/Tanggal	Irman / 15 Januari 2025
UAPA	☐	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
UAPPA-E1	☐	BPPMKHP	
UAPPA-W	☐	Provinsi Sulawesi Selatan	
UAKPA	☐	Balai Besar KIPM Makassar	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :			
1. Satker belum melakukan tutup buku per bulan Desember 2024 dan belum terbit SHR; 2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00 sesuai dengan BA Kas Opname dan LPJ Bendahara Penerimaan; 3. Persediaan senilai Rp0,00 telah didukung dengan BA Stock Opname dan sesuai dengan Permen KP 37 2023; 4. Telaah LK oleh Biro Keuangan belum dilakukan; 5. Validitas data laporan keuangan pada MonSAKTI per tanggal 15 Januari 2025 diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan pada Menu To Do List. 6. Tidak terdapat Aset Lain-Lain (rusak berat) Terdapat koreksi berupa 1. Tidak terdapat koreksi.			
Penyajian LK :			
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :			
Pagu sebesar Rp13.185.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.892.550.118,00 (97,77%) Target Pendapatan sebesar Rp3.627.065.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp3.796.568.700,00 (104,67%) Tidak ada koreksi			
B. Laporan Operasional :			
Surplus/Defisit LO senilai Rp(8.721.785.981,00)			
Tidak ada koreksi			
C. Laporan Perubahan Ekuitas :			
Ekuitas awal senilai Rp36.230.547.829,00 Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(8.919.100.658,00) Ekuitas akhir senilai Rp27.311.447.171,00 Tidak ada koreksi,			
D. Neraca :			
1. Jumlah Aset senilai Rp27.414.196.032,00 , terdiri dari: a. Aset Lancar senilai Rp80.272.481,00 b. Aset Tetap senilai Rp27.333.923.551,00 c. Aset Lainnya senilai Rp0,00 2. Jumlah Kewajiban senilai Rp102.748.861,00 , berupa: a. Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) yang masih garus dibayar senilai Rp82.652.900,00 ; b. Belanja Barang (Langganan Air, Listrik, dan Telepon) senilai Rp20.095.961,00 . 3. Ekuitas senilai Rp27.311.447.171,00 4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp27.414.196.032,00 Tidak ada koreksi			

E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN		
Sampai dengan saat Reviu, CaLK dan CLBMN masih berupa Draft, terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan pada CaLK, yaitu: a. Pembayaran Belanja Barang yang dibayar di muka senilai Rp27.200.000,00; b. Koreksi Lainnya senilai Rp85.454,00; dan c. Kewajiban senilai Rp102.748.861,00 untuk pembayaran apa saja		
Usulan Koreksi		
Melengkapi CaLK dengan: a. Pembayaran Belanja Barang yang dibayar di muka senilai Rp27.200.000,00; b. Koreksi Lainnya senilai Rp85.454,00; dan c. Kewajiban senilai Rp102.748.861,00 untuk pembayaran apa saja		
Tindak Lanjut		
Melengkapi CaLK dengan: a. Pembayaran Belanja Barang yang dibayar di muka senilai Rp27.200.000,00; b. Koreksi Lainnya senilai Rp85.454,00; dan c. Kewajiban senilai Rp102.748.861,00 untuk pembayaran apa saja		
Koreksi yang Belum Ditindak Lanjuti		
-		
		Bandung, 15 Januari 2025
Tim Reviu,  Ari Setyobudi	Operator Keuangan,  Junaedi	Operator BMN  Niza Mahaputri Zainal

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN 2024

Kode dan Nama UAKPA : (427598) Balai Besar KIPM Makassar
Kode dan Nama UAPPAW : (1900) Sulawesi Selatan
Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP
Kode dan Nama K/L : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBP		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak

	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akreal		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	V		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	V		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	V		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	V		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual	V		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak

6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akreal?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akreal pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akreal		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akreal	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akreal		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akreal		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akreal	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	V		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		V	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	V		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	V		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	V		Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914,	V		Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	V		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	V		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	V		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	V		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	V		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	V		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca	V		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Karwit, S.Pi)

Makassar, 9 Januari 2025
Penelaah,

(Junaedi, SE)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR 427598

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 6:32 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,627,065,000	3,796,568,700	169,503,700	104.67	3,604,250,000	4,129,156,575	524,906,575	114.56
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,627,065,000	3,796,568,700	169,503,700	104.67	3,604,250,000	4,129,156,575	524,906,575	114.56
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,627,065,000	3,796,568,700	169,503,700	104.67	3,604,250,000	4,129,156,575	524,906,575	114.56
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	13,185,994,000	12,892,550,118	(293,443,882)	97.77	20,793,691,000	20,759,915,066	(33,775,934)	99.84
1. Belanja Pegawai	6,994,812,000	6,989,045,120	(5,766,880)	99.92	13,459,161,000	13,451,331,199	(7,829,801)	99.94
2. Belanja Barang	5,499,838,000	5,214,266,960	(285,571,040)	94.81	7,276,530,000	7,250,780,617	(25,749,383)	99.65
3. Belanja Modal	691,344,000	689,238,038	(2,105,962)	99.70	58,000,000	57,803,250	(196,750)	99.66
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR 427598

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 6:32 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,185,994,000	12,892,550,118	(293,443,882)	97.77	20,793,691,000	20,759,915,066	(33,775,934)	99.84
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Makassar, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda



[Signature]
SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
NIP.197705032006042002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 427598
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/25 8:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/25 4:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,814,431,000	2,328,424,000	2,328,423,800	0	2,328,423,800	100	200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63,000	32,000	30,478	876	29,602	92.51	2,398
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	478,083,000	197,981,000	197,980,450	0	197,980,450	100	550
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	109,875,000	55,419,000	55,418,984	0	55,418,984	100	16
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	72,310,000	30,850,000	30,850,000	0	30,850,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	386,715,000	170,404,000	170,404,000	0	170,404,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,398,000	23,471,000	23,470,575	0	23,470,575	100	425
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	248,411,000	126,011,000	126,010,800	0	126,010,800	100	200
511129	Belanja Uang Makan PNS	706,860,000	297,220,000	291,996,000	111,000	291,885,000	98.21	5,335,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,320,000	34,160,000	34,160,000	0	34,160,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,860,466,000	3,263,972,000	3,258,745,087	111,876	3,258,633,211	99.84	5,338,789
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	403,179,000	171,921,000	171,904,000	0	171,904,000	99.99	17,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	403,179,000	171,921,000	171,904,000	0	171,904,000	99.99	17,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,835,458,000	3,558,919,000	3,558,573,443	65,534	3,558,507,909	99.99	411,091
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,835,458,000	3,558,919,000	3,558,573,443	65,534	3,558,507,909	99.99	411,091
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14,099,103,000	6,994,812,000	6,989,222,530	177,410	6,989,045,120	99.92	5,766,880
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,980,047,000	1,138,895,000	1,124,590,339	0	1,124,590,339	98.74	14,304,661
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,600,000	13,110,000	13,101,820	0	13,101,820	99.94	8,180
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60,000,000	21,924,000	15,418,838	0	15,418,838	70.33	6,505,162
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	252,696,000	80,064,000	80,064,000	0	80,064,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	211,062,000	177,188,000	171,058,161	0	171,058,161	96.54	6,129,839
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,549,405,000	1,431,181,000	1,404,233,158	0	1,404,233,158	98.12	26,947,842
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	191,812,000	85,891,000	84,202,550	0	84,202,550	98.03	1,688,450
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	3,420,000	3,400,000	0	3,400,000	99.42	20,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23,010,000	21,010,000	19,992,055	0	19,992,055	95.15	1,017,945
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	222,982,000	110,321,000	107,594,605	0	107,594,605	97.53	2,726,395
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 427598
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/25 8:42 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/25 4:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	276,084,000	163,206,000	158,369,600	0	158,369,600	97.04	4,836,400
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	413,190,000	225,969,000	198,278,137	0	198,278,137	87.75	27,690,863
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	689,274,000	389,175,000	356,647,737	0	356,647,737	91.64	32,527,263
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	407,628,000	407,616,438	0	407,616,438	100	11,562
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	6,300,000	6,293,450	0	6,293,450	99.9	6,550
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	7,572,000	7,570,180	0	7,570,180	99.98	1,820
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,500,000	0	0	0	0		0
522141	Belanja Sewa	175,000,000	127,288,000	127,200,000	0	127,200,000	99.93	88,000
522151	Belanja Jasa Profesi	76,800,000	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	537,526,000	943,077,000	938,190,467	0	938,190,467	99.48	4,886,533
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,279,826,000	1,517,365,000	1,512,370,535	0	1,512,370,535	99.67	4,994,465
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	351,900,000	539,256,000	467,427,017	0	467,427,017	86.68	71,828,983
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	596,569,000	594,736,000	508,414,761	0	508,414,761	85.49	86,321,239
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	948,469,000	1,133,992,000	975,841,778	0	975,841,778	86.05	158,150,222
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,249,228,000	722,814,000	669,768,147	0	669,768,147	92.66	53,045,853
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	248,310,000	135,340,000	131,661,000	300,000	131,361,000	97.06	3,979,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	169,400,000	59,650,000	56,450,000	0	56,450,000	94.64	3,200,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124,800,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,791,738,000	917,804,000	857,879,147	300,000	857,579,147	93.44	60,224,853
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,481,694,000	5,499,838,000	5,214,566,960	300,000	5,214,266,960	94.81	285,571,040
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	691,344,000	689,238,038	0	689,238,038	99.7	2,105,962
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	691,344,000	689,238,038	0	689,238,038	99.7	2,105,962
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	691,344,000	689,238,038	0	689,238,038	99.7	2,105,962
	JUMLAH BELANJA	21,580,797,000	13,185,994,000	12,893,027,528	477,410	12,892,550,118	97.77	293,443,882

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 427598

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/25 9:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3,610,945,000	3,777,068,000	0	3,777,068,000	104.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	3,610,945,000	3,777,068,000	0	3,777,068,000	104.6
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	16,120,000	940,000	0	940,000	5.83
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	16,120,000	940,000	0	940,000	5.83
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,470,000	0	1,470,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,470,000	0	1,470,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,090,700	0	17,090,700	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	17,090,700	0	17,090,700	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,627,065,000	3,796,568,700	0	3,796,568,700	104.67
	JUMLAH PENDAPATAN	3,627,065,000	3,796,568,700	0	3,796,568,700	104.67

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 6:59 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	27,200,000	7,500,000	19,700,000	262.67
Piutang Bukan Pajak	0	17,090,700	(17,090,700)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(85,454)	85,454	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	17,005,246	(17,005,246)	(100.00)
Persediaan	53,072,481	82,025,735	(28,953,254)	(35.30)
JUMLAH ASET LANCAR	80,272,481	106,530,981	(26,258,500)	(24.65)
ASET TETAP				
Tanah	20,345,060,000	23,674,412,000	(3,329,352,000)	(14.06)
Peralatan dan Mesin	18,809,622,744	23,527,067,070	(4,717,444,326)	(20.05)
Gedung dan Bangunan	6,115,277,600	11,651,848,924	(5,536,571,324)	(47.52)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	217,041,650	229,490,850	(12,449,200)	(5.42)
Aset Tetap Lainnya	74,086,555	74,086,555	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18,698,722,496)	(22,456,606,633)	3,757,884,137	(16.73)
JUMLAH ASET TETAP	26,862,366,053	36,700,298,766	(9,837,932,713)	(26.81)
JUMLAH ASET	26,942,638,534	36,806,829,747	(9,864,191,213)	(26.80)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	102,748,861	576,281,918	(473,533,057)	(82.17)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	102,748,861	576,281,918	(473,533,057)	(82.17)
JUMLAH KEWAJIBAN	102,748,861	576,281,918	(473,533,057)	(82.17)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	26,839,889,673	36,230,547,829	(9,390,658,156)	(25.92)
JUMLAH EKUITAS	26,839,889,673	36,230,547,829	(9,390,658,156)	(25.92)
JUMLAH EKUITAS	26,839,889,673	36,230,547,829	(9,390,658,156)	(25.92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,942,638,534	36,806,829,747	(9,864,191,213)	(26.80)

Keterangan :
FINAL

Makassar, 5 Mei 2025
Menanggung Jawab UAKPA
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda

SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
NID.197705032006042002



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:04 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	12,892,550,118
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,796,568,700	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	3,777,068,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	940,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,470,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,090,700
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,328,423,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30,478	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	197,980,450	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55,418,984	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	30,850,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	170,404,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	23,470,575	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	126,010,800	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	291,996,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	34,160,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	171,904,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,558,573,443	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,124,590,339	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,101,820	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,418,838	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,064,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	171,058,161	0
3.0	521211	Belanja Bahan	84,202,550	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,992,055	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	158,369,600	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	198,278,137	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	407,616,438	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,293,450	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,570,180	0
3.0	522141	Belanja Sewa	127,200,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	25,500,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	938,190,467	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	467,427,017	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508,414,761	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	669,768,147	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	131,661,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:04 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56,450,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	689,238,038	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	876
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	111,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	65,534
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
JUMLAH			16,689,596,228	16,689,596,228

Keterangan :
FINAL

Makassar, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda


SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
10/205032006042002



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 7:02 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	27,200,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,608,835	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,207,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	26,256,646	0
0.0	131111	Tanah	20,345,060,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,809,622,744	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,115,277,600	0
0.0	134112	Irigasi	66,238,000	0
0.0	134113	Jaringan	150,803,650	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	74,086,555	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,330,159,234
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,306,884,115
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	21,558,135
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	40,121,012
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	82,652,900
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	20,095,961
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,892,550,118
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,796,568,700	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,391,071,299	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	97,689,750
0.0	391111	Ekuitas	0	36,230,547,829
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	85,454
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	3,777,068,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	940,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,470,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,328,423,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29,602	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	197,980,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	55,418,984	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,850,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	170,709,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	23,470,575	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	126,010,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	291,885,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	34,160,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	171,904,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,100,844,943	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,124,590,339	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 7:02 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13,101,820	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,418,838	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80,064,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	171,058,161	0
3.0	521211	Beban Bahan	84,202,550	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	19,992,055	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	392,484,105	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,514,672	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,306,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	107,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	938,190,467	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	467,427,017	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	508,414,761	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	670,068,147	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	131,061,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56,450,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	902,889,974	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	226,499,736	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,874,418	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,835,324	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	332,663,878	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	16,102,755	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	134,524,108	0
JUMLAH			71,801,822,508	71,801,822,508

Keterangan :

FINAL

Makassar, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda

SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
197705032006042002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 5:31 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,779,478,000	4,096,196,576	(316,718,576)	(7.732)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,779,478,000	4,096,196,576	(316,718,576)	(7.732)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,779,478,000	4,096,196,576	(316,718,576)	(7.732)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,531,687,154	13,989,542,065	(7,457,854,911)	(53.31)
Beban Persediaan	467,187,986	737,531,929	(270,343,943)	(36.655)
Beban Barang dan Jasa	2,988,323,207	3,953,233,341	(964,910,134)	(24.408)
Beban Pemeliharaan	991,944,533	1,123,200,968	(131,256,435)	(11.686)
Beban Perjalanan Dinas	857,579,147	1,475,004,584	(617,425,437)	(41.859)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 5:31 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,136,099,452	1,451,993,204	(315,893,752)	(21.756)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	9,000	(9,000)	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	12,972,821,479	22,730,515,091	(9,757,693,612)	(42.928)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,193,343,479)	(18,634,318,515)	9,440,975,036	(50.664)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	32,959,999	(32,959,999)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	32,959,999	(32,959,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(4,302,650)	4,302,650	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,302,650	(4,302,650)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	28,657,349	(28,657,349)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,193,343,479)	(18,605,661,166)	9,412,317,687	(50.588)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,193,343,479)	(18,605,661,166)	9,412,317,687	(50.588)

Keterangan :
FINAL

Makassar, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda




SRI RAHAYO SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
NIP. 197705032006042002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Tgl Data : 05/05/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 5:39 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	36,230,547,829	38,114,184,068	(1,883,636,239)	(4.94)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,193,343,479)	(18,605,661,166)	9,412,317,687	(50.59)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	85,454	15,214,246	(15,128,792)	(99.44)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	85,454	15,214,246	(15,128,792)	(99.44)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(197,400,131)	16,706,810,681	(16,904,210,812)	(101.18)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(9,390,658,156)	(1,883,636,239)	(7,507,021,917)	398.54
EKUITAS AKHIR	26,839,889,673	36,230,547,829	(9,390,658,156)	(25.92)

Keterangan :
FINAL

Makassar, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI., M.SC
NIP.197705032006042002



MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 025
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	511124	BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS	305.000,00	
2	K	212111	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR		305.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan Desember 2024 untuk 1 orang pegawai

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor 00006A		Tanggal 08-Jan-2025	
		Halaman 1 dari 2	
Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 305.000,00			
**** TIGA RATUS LIMA RIBU RUPIAH ****			
Tahun Anggaran 2025		Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI	
Dasar Pembayaran		Jatuh Tempo : Segera	
DIPA		Cara Bayar : SP2D	
Nomor : DIPA-032.13.2.427598/2025			
Tanggal : 02-Dec-2024			
UU NOMOR 62 TAHUN 2024			
TENTANG APBN 2025			
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
427598.136.511119.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		80,00	
427598.136.511124.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		493.000,00	
Jumlah Pengeluaran		493.080,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
427598.136.425911.0321300.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000		185.000,00	
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999162.000000		3.080,00	
Jumlah Potongan		188.080,00	
TOTAL PEMBAYARAN		305.000,00	
Kepada:			
Nomor : 833706		Bank / Pos : TERLAMPIR	
Nama Supplier : BALAI BESAR KARANTINA IKAN,		Rekening : TERLAMPIR	
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN		Nama Pemilik : TERLAMPIR	
HASIL PERIKANAN MAKASSAR		Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji	
NPWP1 : 0001729805801000		Tunjangan Fungsional Bulan Desember Tahun 2024	
NPWP2 : 0001729805801000		untuk 1 Pegawai.	
NOP :			
ALAMAT : Jl. Dakota No. 24 Makassar			
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM			
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		Makassar, 08 Januari 2025	
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		a.n Kuasa Pengguna Anggaran	
#23 NTqWOTMOMJc=		Pejabat Penandatanganan SPM	
			
		KARWII, S.PI	
		NIP 197006181991031001	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR			
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00006A			
Tanggal : 08-Jan-2025			
Halaman 2 dari 2			
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ABDUL MUBARAK AZIS, A.MD 0272895477 7172041006840001	305.000,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK ABDUL MUBARAK AZIS
JUMLAH		305.000,00	
Makassar, 08 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM  KARWIT, S.Pi NIP 197006181991031001			

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 024
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	512411	BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN)	3.412.800,00	
2	K	212111	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR		3.412.800,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran tunjangan kinerja susulan tambahan Plt bulan Desember 2024 untuk 1 orang pegawai

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor 00005A		Tanggal 08-Jan-2025	
Halaman 1		dari 2	
Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.412.800,00			
**** TIGA JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****			
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-032.13.2.427598/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja Susulan Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D	
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
427598.136.512411.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		3.945.038,00	
Jumlah Pengeluaran		3.945.038,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
119930.136.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000		532.238,00	
Jumlah Potongan		532.238,00	
TOTAL PEMBAYARAN		3.412.800,00	
Kepada:			
Nomor : 833706		Bank / Pos : TERLAMPIR	
Nama Supplier : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR		Rekening : TERLAMPIR	
NPWP1 : 0001729805801000		Nama Pemilik : TERLAMPIR	
NPWP2 : 0001729805801000		Uraian : Pembayaran Tunjangan Kinerja Susulan Tambahan/PLT Bulan Desember Tahun 2024 untuk 1 Pegawai.	
NOP :			
ALAMAT : Jl. Dakota No. 24 Makassar			
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM		Makassar, 08 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM	
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM			
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		KARWII, S.PI NIP 197006181991031001	
#23:NTgwNDA4MDQ=			

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00005A

Tanggal : 08-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	MOHAMMAD ZAMRUD 0087127721 7207022811800001	3.412.800,00	BANK NEGARA INDONESIA MOHAMMAD ZAMRUD
JUMLAH		3.412.800,00	

Makassar, 08 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



KARWIT, S.Pi
NIP 197006181991031001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 021
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	512411	BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN)	65.627.150,00	
2	K	212111	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR		65.627.150,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember 2024 untuk 9 orang pegawai

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Disetujui oleh:
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
31 DESEMBER 2024

Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00002A	Tanggal 06-Jan-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 65.627.150,00		
**** ENAM PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-032.13.2.427598/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja Susulan Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
427598.136.512411.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		71.263.276,00
Jumlah Pengeluaran		71.263.276,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119930.136.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000		5.636.126,00
Jumlah Potongan		5.636.126,00
TOTAL PEMBAYARAN		65.627.150,00
Kepada:		
Nomor : 833706	Bank / Pos : TERLAMPIR	
Nama Supplier : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Rekening : TERLAMPIR	
	Nama Pemilik : TERLAMPIR	
NPWP1 : 0001729805801000	Uraian : Pembayaran Tunjangan Kinerja Susulan Bulan Desember Tahun 2024 untuk 9 Pegawai.	
NPWP2 : 0001729805801000		
NOP :		
ALAMAT : Jl. Dakota No. 24 Makassar		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM		Makassar, 06 Januari 2025
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
©23 NTc5NDcOMJE=		KAKWIT, S.PI NIP 197006181991031001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ARNIYANTI,A.MD 1795100285 7372035405890004	3.510.400,00	BANK NEGARA INDONESIA ARNIYANTI
2	ERLINA KADANG,S.KOM 0207702494 3603236302790002	4.595.150,00	BANK NEGARA INDONESIA ERLINA KADANG
3	IR. HABRIN YAKE,MM 0183758588 5103010510670001	9.896.000,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK HABRIN YAKE, IR
4	KAMARUDDIN, S.P, M.SI 0095882616 7371111503690018	9.896.000,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK KAMARUDIN
5	KAMDANI, S.PI 216258071 7306181003690002	9.896.000,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK KAMDANI, S.PI
6	MOHAMMAD ZAMRUD 0087127721 7207022811800001	5.979.200,00	BANK NEGARA INDONESIA MOHAMMAD ZAMRUD
7	MUH.IRFAN RAIS 0461092781 7271032803780005	5.979.200,00	BANK NEGARA INDONESIA MUHAMMAD IRFAN RAIS
8	SRI RAHAYU SETYANINGSIH, S.ST.PI 0198680680 7371114305770001	5.979.200,00	BANK NEGARA INDONESIA SRI RAHAYU SETYANINGSIH,S.ST.PI
9	WAODE SUHARNI, S.PI 0198680748 7371115209680006	9.896.000,00	BANK NEGARA INDONESIA WAODE SUHARNI, SPI
JUMLAH		65.627.150,00	

NIP 197006181991031001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 022
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	512411	BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN)	9.895.150,00	
2	K	212111	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR		9.895.150,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember 2024 untuk 2 orang pegawai

Dibuat oleh:
JUNAEDI



31 DESEMBER 2024



Direkam oleh:
JUNAEDI



31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00003A	Tanggal 06-Jan-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 9.895.150,00		
**** SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-032.13.2.427598/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja Susulan Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
427598.136.512411.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		10.455.569,00
Jumlah Pengeluaran		10.455.569,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119930.136.411121.0150400.0000000.00000000000.00000.2.1951.2.000000.000000		560.419,00
Jumlah Potongan		560.419,00
TOTAL PEMBAYARAN		9.895.150,00
Kepada:		
Nomor : 833706	Bank / Pos : TERLAMPIR	
Nama Supplier : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Rekening : TERLAMPIR	
NPWP1 : 0001729805801000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	
NPWP2 : 0001729805801000	Uraian : Pembayaran Tunjangan Kinerja Susulan Bulan Desember Tahun 2024 untuk 2 Pegawai.	
NOP :		
ALAMAT : Jl. Dakota No. 24 Makassar		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM		Makassar, 06 Januari 2025
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
e23 NTc5NDcOMJ I=		KAKWII, S.PI NIP 197006181991031001

Halaman 2 dari 2

KARWIT, S.Pi
NIP 197006181991031001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 023
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	512411	BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN)	3.412.800,00	
2	K	212111	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR		3.412.800,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran tunjangan kinerja susulan tambahan Plt bulan November 2024 untuk 1 orang pegawai

Dibuat oleh:
JUNAEDI


31 DESEMBER 2024



Disetujui oleh :
KARWIT, S.PI


31 DESEMBER 2024

Direkam oleh :
JUNAEDI


31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00004A

Tanggal 08-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.412.800,00

**** TIGA JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-032.13.2.427598/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG APBN 2025

Jenis Tagihan : Tunjangan Kinerja
Susulan
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

427598.136.512411.03213WA.3987EBA.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000

3.864.797,00

Jumlah Pengeluaran

3.864.797,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119930.136.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1951.2.000000.000000

451.997,00

Jumlah Potongan

451.997,00

TOTAL PEMBAYARAN

3.412.800,00

Kepada:

Nomor : 833706
Nama Supplier : BALAI BESAR KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MAKASSAR
NPWP1 : 0001729805801000
NPWP2 : 0001729805801000
NOP :
ALAMAT : Jl. Dakota No. 24 Makassar

Bank / Pos : TERLAMPIR
Rekening : TERLAMPIR
Nama Pemilik : TERLAMPIR
Uraian : Pembayaran Tunjangan Kinerja Susulan Tambahan/PLT
Bulan Nopember Tahun 2024 untuk 1 Pegawai.

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

©23 | NTgwNDA4MDU=

Makassar, 08 Januari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



KARVIT, S.Pi
NIP 197006181991031001

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal : 08-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	MOHAMMAD ZAMRUD 0087127721 7207022811800001	3.412.800,00	BANK NEGARA INDONESIA MOHAMMAD ZAMRUD
JUMLAH		3.412.800,00	

Makassar, 08 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



KARWIT, S.Pi
NIP 197006181991031001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 020
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	521111	BEBAN KEPERLUAN PERKANTORAN	111.000,00	
2	K	212112	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR		111.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Internet Bulan Desember 2024

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 019
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	BEBAN LANGGANAN TELEPON	255.633,00	
2	K	212112	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR		255.633,00

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Telepon Bulan Desember 2024

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/ PKP : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250105004275980001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 427598
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2025
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2025*)

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

TOTAL TAGIHAN RP 255.633
CHARGE

ABONEMEN	Rp	230.300
SELULER	Rp	0
LOKAL	Rp	0
SLJJ	Rp	0
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	0
JASNITA	Rp	0
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	25.333
Tagihan Bulan Ini	Rp	255.633
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah
Amount in Words Two Hundred Fifty-five Thousand Six Hundred Thirty-three Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 05 Januari 2025

Satker Name: BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH



Rahmalia Dini Putranti
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
BULAN : Januari 2025
JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL V INDONESIA TIMUR
AREA MAKASSAR

DEPARTEMEN : DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
MABES/KOTAMA : BALAI KARANTINA IKAN
HASANUDDIN
SATUAN KERJA : BALAI BESAR KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAKASSAR

Nomor Tagihan, Invoice Number : 0420250105004275980001

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJ	INTER LOKAL	SU	LAIN- LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	0411555120	202501	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.700	3.157	0	31.857
2	0411555159	202501	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.700	3.157	0	31.857
3	04114813539	202501	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	5.291	0	53.391
4	04114813452	202501	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	96.100	0	0	0	0	0	0	0	0	96.100	10.571	0	106.671
5	0411874793	202501	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.700	3.157	0	31.857
Total				230.300	0	0	0	0	0	0	0	0	230.300	25.333	0	255.633

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL V INDONESIA TIMUR
AREA MAKASSAR

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250105004275980001

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 255.633.00
(Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

DEPARTEMEN	: DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI	: PEMERINTAHAN
MABES/KOTAMA	: BALAI KARANTINA IKAN
	HASANUDDIN
SATUAN KERJA	: BALAI BESAR KARANTINA IKAN,
	PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
	PERIKANAN MAKASSAR
SERVIS AREA	: MAKASSAR

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 05 Januari 2025

Rincian tagihan disiapkan oleh
RAHMALIA DINI PUTRANTI
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 018
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	BEBAN LANGGANAN LISTRIK	19.084.638,00	
2	K	212112	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR		19.084.638,00

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Listrik Bulan Desember 2024

Dibuat oleh:
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024



Disetujui oleh:
31 DESEMBER 2024

Direkam oleh :
JUNAEDI
31 DESEMBER 2024

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN PELANGGAN SATKER PER BULAN

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : AGAPUSAT/2025/427598
TANGGAL : 05 Januari 2025

SATKER : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN M
KODE SATKER : 427598
NO TAGIHAN : AGA/DALUP3/2025/427598
BULAN INVOICE : Januari 2025

NO	NAMA PELANGGAN	IDPEL	BULAN TAGIHAN	TARIF	DAYA	PEMAKAIAN KWH				BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN	PPN	LAIN LAIN	JML TAGIHAN SEBELUM METERAI	MAT	JML TAGIHAN SETELAH METERAI
						ST.AWAL	ST.AKHIR	F.KALI	KWH							
1	BALAI KARANTINA IKAN	321201343083	202501	P1	66.000	35.746,67	36.073,90	20	6.545	0	11.123,424	0	0	11.123,424	10.000	11.133,424
2	KTR KARANTINA IKAN	321300601107	202501	P1	23.000	79.947,87	83.506,45	1	4.559	0	7.746,458	0	0	7.746,458	10.000	7.756,458
3	BALAI KARANTINA IKAN	321302071833	202501	P1	2.200	59.303,00	59.484,00	1	181	0	194,756	0	0	194,756	0	194,756
	JUMLAH								11.284	0	19.064,638	0	0	19.064,638	20.000	19.084,638

Terbilang Sembilan Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah

PT PLN (PERSERO)



Dilandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN
MANAJEMEN PELANGGAN
PT PLN DARMADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 017
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- 1

☐

Pendapatan Diterima Dimuka
- 2

☐

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- 3

☐

Beban Dibayar Dimuka
- 4

☒

Beban yang Masih Harus Dibayar
- 5

☐

Penyisihan Piutang
- 6

☐

Penghapusan Piutang
- 7

☐

Penyusutan
- 8

☐

Kas Di Bandahara Penerimaan
- 9

☐

Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran
- 10

☐

Persediaan
- 11

☐

Koreksi Antar Beban
- 12

☐

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 13

☐

Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- 14

☐

Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- 15

☐

Pelepasan Aset Tetap
- 16

☐

Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- 17

☐

Transfer Masuk
- 18

☐

Transfer Keluar
- 19

☐

Koreksi Beban Aset
- 20

☐

Penyesuaian Lainnya

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	BEBAN LANGGANAN AIR	644.690,00	
2	K	212112	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR		644.690,00

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan PDAM Bulan Desember 2024

Dibuat oleh:
JUNAEDI


31 DESEMBER 2024

Disetujui oleh:
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
PENGELOLAAN DAN KEAMANAN PERIKANAN
MAKASSAR


31 DESEMBER 2024

Direkam oleh:
JUNAEDI


31 DESEMBER 2024

Invoice Air PDAM

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20250108/XXV/I/2415652326
Tanggal 8 Jan 2025 11:39

Status	Transaksi berhasil
Produk	KOTA MAKASSAR (SULSEL)
No.Reff	dh2ha62677e027e1724cb97
Gol Tarif	R10
No. Pelanggan	199206255
Nama	B.KARANTINA HASANUDDIN
Alamat	LANDAK BARU 7
Total Tagihan	Rp641.190
Biaya Admin	Rp2.500

Biaya Layanan Rp1.000
Total Bayar Rp644.690

Metode Pembayaran

BRI Virtual Account

Detail Periode Terbayar

Periode	Desember 2024
Tagihan	Rp641.190
Meter Lalu	1227
Meter Kini	1306
Pemakaian	79 m3

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 013 BPPMHKP
WILAYAH : 1900 SULAWESI SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427598 BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
NO DOKUMEN : 026
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / DESEMBERS 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 | ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | ☒ | Beban Dibayar Dimuka | 13 | ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | ☐ | Penyisihan Piutang | 15 | ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | ☐ | Penghapusan Piutang | 16 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | ☐ | Penyusutan | 17 | ☐ | Transfer Masuk |
| 8 | ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | ☐ | Transfer Keluar |
| 9 | ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | ☐ | Koreksi Beban Aset |
| 10 | ☐ | Persediaan | 20 | ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)	27.200.000,00	
2	K	522141	BEBAN SEWA		27.200.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Pembayaran Sewa Digi Sign SLIM FLOORSTAND 55 INCH (SF55B) selama 4 bulan

Dibuat oleh:
JUNAEDI

31 DESEMBER 2024



Direkam oleh :
JUNAEDI

31 DESEMBER 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-032.13.2.427598/2024

Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (19.51) SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR

KPPN : (136) Makassar II

Satuan Kerja : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Alamat dan No Telp : Jl. Dakota No. 24 , 04114813452

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00186/DRPP/427598/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	87.094.604,00	821.807.947,00	908.902.551,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	85.501.824,00	806.045.867,00	891.547.691,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	1.592.780,00	15.762.080,00	17.354.860,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	87.094.604,00	635.523.579,00	722.618.183,00	0,00
	1. BP UP*)	87.094.604,00	101.885.389,00	188.979.993,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	482.970.651,00	482.970.651,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	36.501.269,00	36.501.269,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	14.166.270,00	14.166.270,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



MOHAMMAD ZAMRUD, S.Pi, MP
NIP 198011282005021001

KOTA MAKASSAR, Desember 2024
Bendahara Pengeluaran



JUMHANA
NIP. 198804202010122002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (19.51) SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR
 Satuan Kerja : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-032.13.2.427598/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (136) Makassar II
 Alamat dan No Telp : Jl. Dakota No. 24 , 04114813452 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	356.572.000,00
3. Selisih	Rp	- 356.572.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 356.572.000,00 karena Penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebesar 356.572.000 merupakan penyetoran PNBK fungsional yang terdiri dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar 1,470,000 dan pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya (425289) sebesar 355.102.000

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



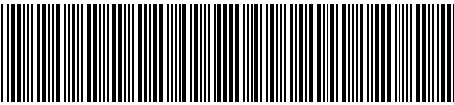
MOHAMMAD ZAMRUD, S.Pi, MP
NIP 198011282005021001

KOTA MAKASSAR , 06 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



IRMA SYAM
NIP 198307312007012006



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.427598/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 22
Tanggal : 27 Desember 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
- Sebesar : Rp. 13.185.994.000 (TIGA BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	11.051.329.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.134.665.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 13.185.994.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

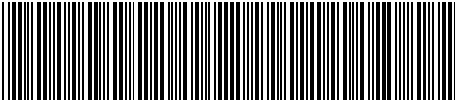
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024

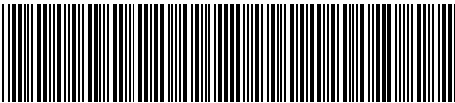


DS:0200-0397-3846-5230

Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1.919.000.000
EC.3989	Pengendalian Mutu	Rp.	1.466.344.000
EC.7010	Manajemen Mutu	Rp.	452.656.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.266.994.000
WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp.	11.266.994.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I A. INFORMASI KINERJA

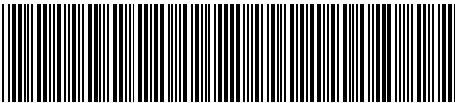


DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Program	:	032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1.919.000.000
Kegiatan	:	3989	Pengendalian Mutu			1.466.344.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase UMKM dan skala menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP			
		2. 02	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			
		3. 03	Persentase Produk Impor yang memenuhi persyaratan mutu			
		4. 04	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan			
		5. 05	Lokasi pengawasan mutu Hasil KP di wilayah RI			
		6. 06	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI			
		7. 07	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability			
		8. 08	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan			
		9. 09	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan			
		10. 10	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan			
		11. 11	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3989.ADF	Sertifikasi Lembaga	10,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	40.000.000
Rincian Output	:	01 ADF.001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	10.00	Lembaga	40.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan	17.000.000
Rincian Output	:	01 BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1.00	Produk	17.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I A. INFORMASI KINERJA

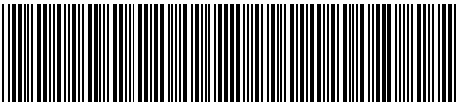


DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Klasifikasi Rincian Output	3	:	3989.PDC	Sertifikasi Produk		425,00	produk, Sertifikat	130.000.000
Rincian Output	:	01	PDC.001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	(PN)	345.00	produk	92.860.000
		02	PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	(PN)	80.00	produk	37.140.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3989.PDF	Sertifikasi Lembaga		35,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	185.000.000
Rincian Output	:	01	PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	(PN)	35.00	Lembaga	185.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		5,00	Produk, Laporan, Keputusan	153.070.000
Rincian Output	:	01	QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	(PN)	5.00	Produk	153.070.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		148,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	249.930.000
Rincian Output	:	01	QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	(PN)	23.00	Lembaga	48.000.000
		02	QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	(PN)	125.00	Lembaga	201.930.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3989.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		1,00	Unit	691.344.000
Rincian Output	:	01	RAL.001	Sarana Pengujian Mutu	(PN)	1.00	Unit	691.344.000
Kegiatan	:	7010		Manajemen Mutu				452.656.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I A. INFORMASI KINERJA

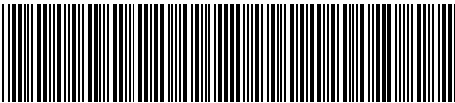


DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Manajemen Mutu									
	2.	02	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi						
	3.	03	Persentase pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu						
	4.	04	Persentase tingkat efektifitas unit kerja penjaminan mutu yang dikendalikan						
	5.	05	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan						
	6.	06	Standardisasi metode yang divalidasi laboratorium Acuan						
	7.	07	Jumlah parameter uji mutu hasil KP yang dihasilkan laboratorium acuan						
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		1,00	Orang, Kegiatan		11.000.000
Rincian Output		:	01	DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.00	Kegiatan		11.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		70.000.000
Rincian Output		:	01	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		70.000.000
					(PN)				
Klasifikasi Rincian Output	10	:	7010.PDD	Standarisasi Lembaga		2,00	Lembaga, Unit Kerja		76.500.000
Rincian Output		:	01	PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.00	Lembaga		56.500.000
		:	02	PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	1.00	Lembaga		20.000.000
					(PN)				
Klasifikasi Rincian Output	11	:	7010.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		100,00	Orang		288.656.000
Rincian Output		:	01	QDC.001	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	100.00	Orang		288.656.000
					(PN)				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I A. INFORMASI KINERJA

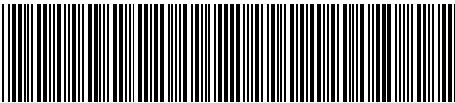


DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Klasifikasi Rincian Output	12	:	7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan	6.500.000
Rincian Output	:	01	QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (PN)	1.00	Produk	6.500.000
Program	:	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				11.266.994.000
Kegiatan	:	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				11.266.994.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai PM PRB BKIPM				
		2. 02	Indeks Profesionalitas ASN				
		3. 03	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi				
		4. 04	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran				
		5. 05	Nilai PM SAKIP				
		6. 06	Nilai Maturitas SPIP				
		7. 07	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar				
		8. 08	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja				
		9. 09	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik				
		10. 10	Nilai IKPA				
		11. 11	Nilai NKA				
		12. 12	Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.136.583.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	8.182.000
		02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	12.575.000
		03	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	22.759.000
		04	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	15.645.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0200-0397-3846-5230

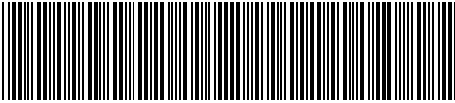
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAKASSAR

Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
	05	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	26.093.000	
	06	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	11.051.329.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	37,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	36.514.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	37.00	Orang	36.514.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	93.897.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	80.159.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	4.270.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	9.468.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
I B. SUMBER DANA



DS:0200-0397-3846-5230

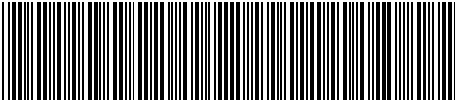
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	13.185.994.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	11.051.329.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	2.134.665.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	6.994.812	5.499.838	691.344	-	-	13.185.994	19 . 51	
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	1.227.656	691.344	-	-	1.919.000		
3989	Pengendalian Mutu	-	775.000	691.344	-	-	1.466.344		
3989.ADF	Sertifikasi Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	40.000	-	-	-	40.000		
04	PNBP	-	40.000	-	-	-	40.000		
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	17.000	-	-	-	17.000		
04	PNBP	-	17.000	-	-	-	17.000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	130.000	-	-	-	130.000		
04	PNBP	-	130.000	-	-	-	130.000	136	

DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

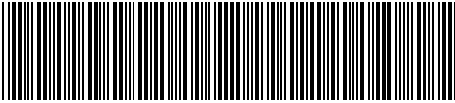
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN

Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Kewenangan : (KD)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

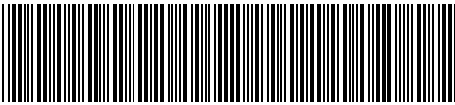


DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	11.000	-	-	-	11.000	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
04	PNBP	-	11.000	-	-	-	11.000	136	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	70.000	-	-	-	70.000	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
04	PNBP	-	70.000	-	-	-	70.000	136	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga	-	76.500	-	-	-	76.500	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
04	PNBP	-	76.500	-	-	-	76.500	136@	
7010.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	288.656	-	-	-	288.656	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
04	PNBP	-	288.656	-	-	-	288.656	136@	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	-	6.500	-	-	-	6.500	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB 032.13.WA	PNBP	-	6.500	-	-	-	6.500	136@	
	Program Dukungan Manajemen	6.994.812	4.272.182	-	-	-	11.266.994		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.994.812	4.272.182	-	-	-	11.266.994		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	6.994.812	4.141.771	-	-	-	11.136.583	19 . 51	
01 RM		6.994.812	4.056.517	-	-	-	11.051.329	136	
04 PNB		-	85.254	-	-	-	85.254	136	
3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	36.514	-	-	-	36.514	19 . 51	
04 PNB		-	36.514	-	-	-	36.514	136	
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	93.897	-	-	-	93.897	19 . 51	
04 PNB		-	93.897	-	-	-	93.897	136	
JUMLAH		6.994.812	5.499.838	691.344	-	-	13.185.994		

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN

Kode>Nama Satker : (427598) BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DS:0200-0397-3846-5230

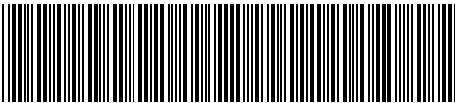
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
IV A. B L O K I R



DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [427598] BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

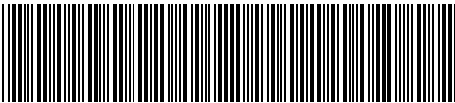
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 361
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 55.001		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	52 Belanja Barang Rp. 55.001	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
032.13.EC 3989	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu		
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.489		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7010	Manajemen Mutu		
7010.PDD	Standarisasi Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7010.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.427598/2024
IV B. C A T A T A N



DS:0200-0397-3846-5230

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [427598] BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1,919,000,000	
3989	Pengendalian Mutu			1,466,344,000	
3989.ADF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	10.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		40,000,000	
3989.ADF.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR	10.0 Lembaga		40,000,000	
051	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)			40,000,000	U
A	Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan			32,500,000	
521211	Belanja Bahan			1,925,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Komputer supplies	1.0 PKT	925,000	925,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,575,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Transport Inspeksi /Verifikasi CPIB	30.0 OK	370,000	11,100,000	
	- Uang Harian Inspeksi / verifikasi CPIB [10 Unit x 3 Org x 0 hari x 1 Hari	30.0 OK	430,000	12,900,000	
	- Transport Inspeksi /Verifikasi/ survelen pengendalian mutu pasca panen [5 Unit x 2 org]	10.0 OK	227,500	2,275,000	
	- Uang Harian Inspeksi / verifikasi/ survelen pengendalian mutu pasca panen [5 Unit x 2 org]	10.0 OK	430,000	4,300,000	
C	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra			7,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			7,500,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Uang Harian monitoring dan Evaluasi UPI [10 OK x 1 Hari]	10.0 OK	430,000	4,300,000	
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi UPI	10.0 OK	320,000	3,200,000	
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		17,000,000	
3989.BIA.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR	1.0 Produk		17,000,000	
051	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya			12,000,000	U
A	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			12,000,000	
521211	Investigasi kasus penahanan/ penolakan produk perikanan			940,000	PNP
	Belanja Bahan				
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK	1.0 PKT	940,000	940,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			860,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Uang Harian Investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan [2 Orang x 1 hari]	2.0 OK	430,000	860,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10,200,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Survelen HACCP	68.0 OK	150,000	10,200,000	

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			5,000,000	U
A	Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			5,000,000	
521211	Belanja Bahan			5,000,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Komputer suplise	1.0 Pkt	1,000,000	1,000,000	
	- Konsumsi rapat koordinasi	60.0 OK	50,000	3,000,000	
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	425.0 produk, Sertifikat		130,000,000	

3989.PDC.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR	345.0 produk		92,860,000	
051	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			92,860,000	U
A	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			78,960,000	
521211	Belanja Bahan			1,060,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK dan komputer suplies	1.0 PKT	1,060,000	1,060,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			57,500,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Uang Harian Monitoring dan Evaluasi [16 orang x 2 hari]	32.0 OK	430,000	13,760,000	
	- Uang Harian Inspeksi/verifikasi sertifikat HACCP (Maros, Gowa, Takalar)	19.0 OK	430,000	8,170,000	
	- Transport Inspeksi /Verifikasi HACCP (Barru, Jeneponto)	14.0 OK	305,000	4,270,000	
	- Transport Inspeksi /Verifikasi sertifikat HACCP (Pinrang,Palopo)	12.0 OK	600,000	7,200,000	
	- Uang Harian inspeksi/ verifikasi sertifikat HACCP (Pinrang, Palopo) [5 UPI x 2 ORG x 2 KL]	20.0 OK	430,000	8,600,000	
	- Transport inspeksi/ verifikasi sertifikat HACCP (Maros, Gowa, Takalar) [16 UPI x 2 ORG x 0 KL]	32.0 OK	250,000	8,000,000	
	- Transport monitoring dan evaluasi sertifikat HACCP	25.0 OK	300,000	7,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			20,400,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Perjalanan inspeksi/ verifikasi sertifikat HACCP [20 UPI x 2 ORG x 2 KL]	80.0 OK	150,000	12,000,000	
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi sertifikat HACCP	56.0 OK	150,000	8,400,000	
B	Pengembangan kompetensi inspektur mutu			13,900,000	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Uang Harian Temu Teknis HACCP - Uang Harian fullboar Temu Teknis Sertifikat HACCP [1 orang x 2 hari] - Penginapan 2 Hari Temu Teknis sertifikat HACCP - Tiket Makassar- Jakarta Temu Teknis Sertifikat HACCP - Penginapan pembentukan inspektur mutu ber no registrasi - Uang Harian Fullbord pembentukan inspektur mutu ber no registrasi [1 orang x 6 hari] - Uang Harian pembentukan inspektur mutu ber no registrasi [1 orang x 1 Hari] - Tiket Makassar - Semarang PP pembentukan inspektur mutu ber no registrasi	1.0 OK	530,000	530,000	PNP
		2.0 OK	180,000	360,000	
		1.0 OK	540,000	540,000	
		1.0 OK	3,934,000	3,934,000	
		1.0 OK	579,000	579,000	
		6.0 OK	130,000	780,000	
		1.0 OK	370,000	370,000	
		1.0 OK	4,557,000	4,557,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pelatihan HACCP dasar	15.0 OK	150,000	2,250,000	PNP
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	80.0 produk		37,140,000	
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			37,140,000	
A	<i>Validasi produk pada sektor produksi pasca panen</i>			37,140,000	U
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	1.0 PKT	1,015,000	1,015,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transport validasi produk sektor produksi pasca panen [1 org x 7 lok] - Uang Harian validasi produk sektor produksi pasca panen [2 org x 7 lok x 2 hr] - Penginapan [2 org x 5 lok x 1 hr]	7.0 OK	305,000	2,135,000	PNP
		28.0 OH	430,000	12,040,000	
		10.0 OH	350,000	3,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Tranport validasi produk sektor produksi pasca panen	123.0 OK	150,000	18,450,000	PNP
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	35.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		185,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA MAKASSAR Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	35.0 Lembaga		185,000,000	U
051	Penerapanaan Sertifikasi Produksi Primer Yang di validasi			185,000,000	
A	<i>Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer</i>			108,890,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - Perlengkapan kegiatan sertifikasi produksi primer	1.0 PKT	2,180,000	2,180,000	PNP

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transpor inspeksi/ verifikasi/ survelen penerapan sertifikasi produksi primer [19 lok x 3 org] - Uang harian [19 lok x 3 org x 2 hr] - Penginapan [15 lok x 3 org]	57.0 OK 114.0 OH 45.0 OH	300,000 430,000 392,000	83,760,000 17,100,000 49,020,000 17,640,000	A * * *	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transpor inspeksi/ verifikasi/ survelen penerapan sertifikasi produksi primer [51 lok x 3 org]	153.0 OK	150,000	22,950,000		PNP
B	<i>Bimtek/ Sosialisasi sertifikasi produksi primer</i>			76,110,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Tiket pesawat Makassar - Jakarta pp - Transpor lokal - Uang harian - Penginapan	5.0 OK 5.0 OK 20.0 OH 10.0 OH	4,200,000 604,000 530,000 899,000	43,610,000 21,000,000 3,020,000 10,600,000 8,990,000		PNP
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor - Sosialisasi SJMKHP - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) Sosialisasi SJMKHP	110.0 OP 105.0 OK	200,000 100,000	32,500,000 22,000,000 10,500,000		PNP SBM SBM
3989.QIA	<u>Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]</u>	5.0 Produk, Laporan, Keputusan		153,070,000		
	Lokasi : KOTA MAKASSAR					
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	5.0 Produk		153,070,000		
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			60,000,000	U	
A	<i>Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik</i>			60,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK - Komputer supplies - Bahan Lapangan - Konsumsi koordinasi / evaluasi - Penggandaan/ pelaporan	1.0 PKT 1.0 Pkt 1.0 PKT 48.0 OH 1.0 PKT	1,210,000 1,000,000 1,260,000 50,000 1,000,000	6,870,000 1,210,000 1,000,000 1,260,000 2,400,000 1,000,000		PNP
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pembelian sampel [14 Lok x 2 KI]	28.0 PKT	400,000	11,200,000 11,200,000		PNP
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.136-Makassar II) - Bahan pengujian pengawasa mutu dan keamanan hasil perikanan domestik	1.0 PKT	22,880,000	22,880,000		PNP

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Uang Harian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan [18 orang x 1 Hari] - Perjalanan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di luar Makassar [18 org x 1 lok x 0 kl] - Uang Harian pengawasan mutu dan kemanan hasil perikanan	18.0 OH	430,000	13,350,000 7,740,000	PNP
		18.0 OK	216,120	3,890,000	
		4.0 OH	430,000	1,720,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) Perjalanan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di Makassar	38.0 OK	150,000	5,700,000 5,700,000	PNP
052	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya			80,000,000	
A	<i>Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya</i>			<i>80,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan Komputer supplies - Bahan lapangan	1.0 Pkt	998,000	15,286,000 998,000	PNP
		1.0 PKT	14,288,000	14,288,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) Pembelian sampel [2 lok x 2 kl]	4.0 PKT	1,500,000	6,000,000 6,000,000	PNP
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.136-Makassar II) Bahan pengujian residu dan bahan berbahaya	1.0 Pkt	36,360,000	36,360,000 36,360,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Biaya pengiriman sampel [2 lok x 2 kl] - Biaya pengujian [2 lok x 2 kl]	4.0 PKT	450,000	9,112,000 1,800,000	PNP
		4.0 PKT	1,828,000	7,312,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transport monitoring kesegaran residu dan bahan berbahaya (Takalar) [3 orang x 2 kali] - Transport monitoring kesegaran residu dan bahan berbahaya (Sinjai) - Uang Harian monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (Takalar) [4 org x 2 kl x 1 hr] - Uang Harian monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (Sinjai) [3 org x 2 kl x 2 hr] - Penginapan (Sinjai) [4 org x 2 kl]	6.0 OK	200,000	13,242,000 1,200,000	PNP
		2.0 OK	281,000	562,000	
		8.0 OH	430,000	3,440,000	
		12.0 OH	430,000	5,160,000	U
		8.0 OH	360,000	2,880,000	
054	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan			13,070,000	
A	<i>Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan</i>			<i>13,070,000</i>	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Uang Harian Pengawalan impor / verifikasi pemenuhan persyaratan pemasukan hasil perikanan - Transport pengawalan impor / verifikasi pemenuhan persyaratan pemasukan hasil perikanan	30.0 OH	430,000	13,070,000 12,900,000	
		1.0 OK	170,000	170,000	

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	148.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		249,930,000	
3989.QIC.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR	23.0 Lembaga		48,000,000	
052	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability			40,000,000	U
A	Penerapan sistem traceability di UPI			40,000,000	
521211	Penerapan Sistem Traceability di UPI			1,800,000	PNP
	Belanja Bahan				
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK	1.0 Pkt	930,000	930,000	
	- KOmputer suplies	1.0 Pkt	870,000	870,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34,000,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Uang Harian evaluasi traceability [4 Unit x 1 hari x 2 orang]	8.0 OH	430,000	3,440,000	
	- Trasnport evaluasi penerapan traceability [4 Unit x 2 Org]	8.0 OK	295,000	2,360,000	
	- Uang Harian Survelen UPI grade A [2 orang x 1 hari x 20 UPI]	40.0 OH	430,000	17,200,000	
	- Transport Survelen UPI grade A	55.0 OK	200,000	11,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,200,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Perjalanan evaluasi penerapan traceability [14 Unit x 2 Org]	28.0 OK	150,000	4,200,000	
054	Bimtek Traceabiiti Bagi inspektur Mutu 1			8,000,000	U
A	Bimtek traceability bagi Inspektur Mutu			8,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,000,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Tiket Makassar - Jakarta PP	1.0 OK	4,000,000	4,000,000	
	- Taksi	1.0 OK	495,000	495,000	
	- Uang harian	2.0 OH	530,000	1,060,000	
	- Penginapan	3.0 OH	815,000	2,445,000	
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	125.0 Lembaga		201,930,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			201,930,000	U
B	Survelen UPI dalam rangka official control			198,370,000	
521211	Belanja Bahan			2,890,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK	1.0 Pkt	1,445,000	1,445,000	
	- Komputer suplies	1.0 PKT	1,445,000	1,445,000	
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku			59,000,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Bahan Laboratorium pengujian	1.0 PKT	59,000,000	59,000,000	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Uang Harian surveilen grade C [4 UPI x 4 kali x 2 orang] - Uang Harian grade B (pinrang, palopo) [4 upi x 3 kali x 2 orang] - Transport surveilen UPI Grade B [2 orang x 1 orang] - Uang Harian Survelen UPI grade A [2 orang x 1 hari] - Uang Harian Pengawasan stufing - Transport Survelen UPI grade A [5 UPI x 2 KL x 2 ORG] - Survelen UPI grade B [10 UPI x 3 KL x 2 ORG] - Transport Survelen UPI grade B (Pinrang, Palopo) [4 UPI x 3 KL x 2 ORG] - Transport Survelen UPI grade C [4 UPI x 4 KL x 2 ORG]			109,180,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Survelen [10 UPI x 2 KL x 2 ORG] - Survelen - Survelen [5 UPI x 4 KL x 2 ORG] - Pengawasan stufing			27,300,000	PNP
C	<u>Refreshmen panelis organoleptik</u>			3,560,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pembelian ikan contoh			1,810,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pemeriksaan kesehatan panelis organoleptik			1,750,000	PNP
3989.RAL	<u>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]</u>	1.0 Unit		691,344,000	
3989.RAL.001	<u>Sarana Pengujian Mutu</u>	1.0 Unit		691,344,000	
052	<u>Sarana Pengujian Mutu - pnbp</u>			691,344,000	U
A	<u>Sarana pengujian mutu</u>			691,344,000	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.136-Makassar II) > Alat laboratorium uji - Nitrogen Evaporator - Irrigating Bottle - Analitical Balance - Biosafety Cabinet - Dry Oven - Autoclave - Micropipet - Hot Plate Stirrer - Desicator > Sarana layanan laboratorium - Komputer - Laptop - Meubelair pelayanan - Printer - Tablet	 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 2.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 5.0 Unit 7.0 Unit 1.0 Unit 5.0 Unit 1.0 Unit	 153,000,000 3,358,000 23,100,000 155,000,000 55,000,000 6,780,000 3,500,000 8,500,000 7,746,000 16,930,000 18,553,000 23,089,000 3,272,000 17,890,000	691,344,000 419,484,000 153,000,000 3,358,000 23,100,000 155,000,000 55,000,000 6,780,000 7,000,000 8,500,000 7,746,000 271,860,000 84,650,000 129,871,000 23,089,000 16,360,000 17,890,000	PNP
7010	Manajemen Mutu			452,656,000	
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		11,000,000	
7010.DCC.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		11,000,000	U
051	Peningkatan kompetensi inspektur mutu			11,000,000	
A	Bimtek peningkatan kompetensi inspektur mutu			11,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.136-Makassar II) - Tiket pesawat Makassar - Jakarta PP - Taksi - Uang harian - Uang saku fullboard	2.0 OK 2.0 OK 2.0 OH 4.0 OH	4,015,000 615,000 530,000 170,000	8,030,000 1,230,000 1,060,000 680,000	PNP
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		70,000,000	
7010.PBR.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		70,000,000	U
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			70,000,000	
A	Penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM dalam rangka Quality Assurance produk hasil perikanan			70,000,000	

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - Konsumsi asesment/ survelen - ATK - Komputer suplies	25.0 OH 1.0 Pkt 1.0 Pkt	65,000 9,960,000 1,000,000	12,585,000 1,625,000 9,960,000 1,000,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Kalibrasi alat pengujian - Uji profesiensi	1.0 Pkt 2.0 PKT	31,080,000 1,520,000	34,120,000 31,080,000 3,040,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Perjalanan pelatihan / magang - Uang Harian [3 org x 3 hr] - Penginapan [3 org x 2 hr] - Taksi [3 org x 2 kl] - Tiket Makassar-Jakarta PP [3 org x 1 kl]			23,295,000 23,295,000 3,870,000 4,500,000 3,300,000 11,625,000	PNP
7010.PDD	<u>Standarisasi Lembaga[Base Line]</u>	2.0 Lembaga, Unit Kerja		76,500,000	
7010.PDD.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		56,500,000	
052	Pengujian Parameter Destructive Fishing			56,500,000	U
A	<i>Pengujian parameter destructive fishing</i>			30,010,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	PNP
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pembelian sampel	4.0 PKT	500,000	2,000,000	PNP
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.136-Makassar II) - Bahan pengujian destruktif fishing	1.0 PKT	15,722,000	15,722,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Perjalanan pengambilan contoh uji destructive fishing - Transpor [2 org x 4 kl] - Penginapan [2 Org x 1 HR x 4 kl] - Uang harian [2 org x 2 Hr x 4 kl]			11,288,000 11,288,000 1,608,000 2,800,000 6,880,000	PNP
B	<i>Koordinasi penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir</i>			21,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

Rev 22 (POK)

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(427598)

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 13,185,994,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	PNP
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.136-Makassar II) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1.0 OJ	900,000	900,000	PNP
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Halfday meeting [30 org x 2 hr] - Transport peserta	60.0 OK 46.0 OK	205,000 150,000	19,200,000 12,300,000 6,900,000	A * PNP
C	<i>Bimtek penerapan standar sisten pengujian mutu</i>			5,390,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Tiket pesawat Makassar - Surabaya PP - Taksi - Penginapan - Uang harian	1.0 OK 1.0 OK 1.0 OH 2.0 OH	3,133,000 623,000 814,000 410,000	3,133,000 623,000 814,000 820,000	PNP
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	1.0 Lembaga		20,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			20,000,000	U
A	<i>Penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi (ISO 17020) untuk mendukung BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan</i>			20,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK - Konsumsi kegiatan survelen	1.0 pkt 25.0 OH	1,095,000 65,000	1,095,000 1,625,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Biaya surveilen	2.0 OH	3,500,000	7,000,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Perjalanan survelen lembaga inspeksi - Uang Harian [1 org x 4 hr] - Penginapan [2 org x 2 hr] - Taksi [2 org x 1 kl] - Tiket Jakarta - Makassar PP [1 org x 1 kl]	4.0 OH 4.0 OH 2.0 OK 1.0 OK	327,000 849,000 683,000 4,210,000	10,280,000 1,308,000 3,396,000 1,366,000 4,210,000	A * PNP
7010.QDC	<u>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]</u>	100.0 Orang		288,656,000	
7010.QDC.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	100.0 Orang		288,656,000	
051	Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			288,656,000	U
A	<i>Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten</i>			135,000,000	

Rev 22 (P0K)

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
521211	<i>Pinrang</i> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies - Bahan cetak (Spanduk/baner/ goodie bag/ dll) - penggandaan/ pelaporan	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	1,000,000 1,000,000 1,344,000	3,344,000 1,000,000 1,000,000 1,344,000	A	PNP	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.136-Makassar II) - Honor narasumber I (setingkat Menteri/Pejabat Negara) - Honor narasumber II (tenaga ahli) - Honor narasumber III (Pemda/Lembaga terkait)	3.0 OJ 2.0 OJ 1.0 OJ	1,700,000 900,000 900,000	7,800,000 5,100,000 1,800,000 900,000		PNP	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Penyelenggaraan bulan mutu karantina di kabupaten Pinrang	1.0 PKT	90,024,000	90,024,000		PNP	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Perjalanan narasumber setingkat menteri/ pejabat negara - Tiket Narasumber Jakarta - Makassar PP - Uang Harian - Uang Representasi - Penginapan - Transport Bandara - Lokasi PP > Perjalanan narasumber tenaga ahli - Tiket narasumber Jakarta - Makassar PP - Uang Harian [2 org x 2 hr] - Penginapan [2 Org x 1 Hr] - Transport Bandara - Lokasi PP > Perjalanan tim pelaksana UPT - Transpor Makassar - Lokasi PP - Penginapan - Uang Harian [5 org x 2 hr]	1.0 OK 2.0 Hr 2.0 Hr 1.0 hr 1.0 OK 2.0 OK 4.0 Hr 2.0 hr 2.0 OK 5.0 OK 5.0 OH 10.0 OH	7,314,000 430,000 250,000 600,000 230,000 3,699,000 430,000 600,000 230,000 210,000 250,000 300,000	25,582,000 9,504,000 7,314,000 860,000 500,000 600,000 230,000 10,778,000 7,398,000 1,720,000 1,200,000 460,000 5,300,000 1,050,000 1,250,000 3,000,000		*	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transport lokal peserta - Tranport lokal tim pelaksana	50.0 OK 5.0 OK	150,000 150,000	8,250,000 7,500,000 750,000			PNP
B	<i>Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone</i>			145,000,000			

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies - Bahan cetak (Spanduk/baner/ goodie bag/ dll) - penggandaan/ pelaporan	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	1,000,000 1,000,000 1,344,000	3,344,000 1,000,000 1,000,000 1,344,000	PNP
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.136-Makassar II) - Honor narasumber I (setingkat Menteri/Pejabat Negara) - Honor narasumber II (tenaga ahli) - Honor narasumber III (Pemda/Lembaga terkait)	3.0 OJ 2.0 OJ 1.0 OJ	1,700,000 900,000 900,000	7,800,000 5,100,000 1,800,000 900,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Penyelenggaraan bulan mutu karantina di kabupaten Bone	1.0 PKT	100,024,000	100,024,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Perjalanan narasumber setingkat menteri/ pejabat negara - Tiket Narasumber Jakarta - Makassar PP - Uang Harian - Uang Representasi - Penginapan - Transport Bandara - Lokasi PP > Perjalanan narasumber tenaga ahli - Tiket narasumber Jakarta - Makassar PP - Uang Harian [2 org x 2 hr] - Penginapan [2 Org x 1 Hr] - Transport Bandara - Lokasi PP > Perjalanan tim pelaksana UPT - Transpor Makassar - Lokasi PP - Penginapan - Uang Harian [5 org x 2 hr]	1.0 OK 2.0 Hr 2.0 Hr 1.0 hr 1.0 OK 2.0 OK 4.0 Hr 2.0 hr 2.0 OK 5.0 OK 5.0 OH 10.0 OH	7,314,000 430,000 250,000 600,000 230,000 3,699,000 430,000 600,000 230,000 210,000 250,000 300,000	9,504,000 7,314,000 860,000 500,000 600,000 230,000 10,778,000 7,398,000 1,720,000 1,200,000 460,000 5,300,000 1,050,000 1,250,000 3,000,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transport lokal peserta - Tranport lokal tim pelaksana	50.0 OK 5.0 OK	150,000 150,000	8,250,000 7,500,000 750,000	PNP
E	<u>Makan ikan sehat</u>			8,656,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK - Komputer suplies - Penyediaan nasi ikan	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	3,000,000 1,000,000 4,656,000	8,656,000 3,000,000 1,000,000 4,656,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

Rev 22 (POK)

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(427598)

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 13,185,994,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		6,500,000		
7010.QIA.001	Lokasi : KOTA MAKASSAR					
051	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		6,500,000		
A	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			6,500,000	U	
	Sosialisasi dan bimtek penerapan quality assurance usaha Kelautan dan Perikanan			6,500,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,500,000	A	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	> Perjalanan mengikuti sosialisasi dan bimtek penerapan quality assurance			6,500,000		
	- Taksi	2.0 OK	500,000	1,000,000	*	
	- Tiket Makassar - Denpasar PP	1.0 OK	3,829,000	3,829,000	*	
	- Uang harian (1 hari sebelum dan 1 hari sesudah)	2.0 OH	530,000	1,060,000		
	- Penginapan	1.0 OH	611,000	611,000		
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			11,266,994,000		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			11,266,994,000		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	6.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		11,136,583,000		
3987.EBA.956	Lokasi : KOTA MAKASSAR					
051	Layanan BMN	1.0 Layanan		8,182,000		
A	Layanan BMN			8,182,000	U	
	Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/ Jasa			8,182,000		
521211	Belanja Bahan			342,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- Foto copi/ penggandaan/ penjiilidan	1.0 pkt	342,000	342,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			1,800,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- Nara sumber penyusunan data dukung	2.0 OJ	900,000	1,800,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,440,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	> Pembinaan/ penataan BMN di wilker			5,440,000		
	- Tranport	4.0 OK	250,000	1,000,000		
	- Penginapan	4.0 OH	250,000	1,000,000		
	- Uang harian	8.0 OH	430,000	3,440,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- Konsultasi ke KPKNL	4.0 OK	150,000	600,000		
3987.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		12,575,000		
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			12,575,000	U	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Media gathering BKIPM			12,575,000	
521211	Belanja Bahan			1,025,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Konsumsi dan snack kegiatan media gathering	41.0 OK	25,000	1,025,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3,600,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Nara sumber media gathering	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			7,950,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Transport lokal peserta	5.0 OK	150,000	750,000	
	- Paket meeting forum konsultasi publik	60.0 OK	120,000	7,200,000	
3987.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		22,759,000	
051	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			22,759,000	U
A	Pengelolaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM			22,759,000	
521211	Belanja Bahan			5,011,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Penggandaan/ penjiilidan	1.0 PKT	1,451,000	1,451,000	
	- Konsumsi sharing session zona integritas	89.0 OH	40,000	3,560,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3,600,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Nara sumber sharing session zona integritas	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14,148,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	> Peningkatan kompetensi pegawai			14,148,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP	3.0 OK	3,136,000	9,408,000	
	- Taksi	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	- Uang harian [1 org x 6 hr x 3 kl]	18.0 OH	130,000	2,340,000	
3987.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		15,645,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			15,645,000	U
A	Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan			9,304,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1,584,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK dan bahan komputer	12.0 BLN	132,000	1,584,000	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Temu teknis kearsipan - Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) - Penginapan - Taksi - Tiket Makassar - Jakarta PP > Penataan dokumen/ arsip di wilker - Uang harian [2 org x 2 hr]			7,720,000 6,000,000 1,060,000 400,000 800,000 3,740,000 1,720,000 1,720,000	PNP
B	Layanan rumah tangga dan perlengkapan			6,341,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - Penggandaan / penjiilidan	1.0 Pkt	216,000	216,000	PNP
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan bahan komputer	1.0 Pkt	275,000	275,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II) - Transport petugas pelayanan keprotokoleran - Transport urusan rumah tangga dan perlengkapan - Transport kegiatan pimpinan	12.0 OK 12.0 OK 15.0 OK	150,000 150,000 150,000	1,800,000 1,800,000 2,250,000	PNP
3987.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan		26,093,000	U
051	Layanan Data dan Informasi			26,093,000	
A	Layanan data dan informasi			26,093,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II) - Penggandaan/ penjiilidan/ pelaporan	3.0 PKT	1,130,000	3,390,000	PNP
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	1.0 Pkt	325,000	325,000	PNP

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II) > Bimtek sistem informasi - Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) - Taksi - Tiket Makassar - Jakarta PP > Pembahasan/ Pemutakhiran Manajemen Risiko - Tiket Makassar -Yogyakarta PP - Penginapan - Uang harian - Taksi	2.0 OH 2.0 OK 1.0 OK 2.0 OH 8.0 OH 10.0 OH 4.0 OK	530,000 441,000 3,828,000 3,170,000 653,000 420,000 211,000	22,378,000 5,770,000 1,060,000 882,000 3,828,000 16,608,000 6,340,000 5,224,000 4,200,000 844,000	PNP
3987.EBA.994 001 A	<u>Layanan Perkantoran</u> <u>Gaji dan Tunjangan</u> <u>Pembayaran gaji dan tunjangan</u>	1.0 Layanan		11,051,329,000 6,994,812,000 6,994,812,000	U
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.136-Makassar II) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	2,060,825,000 134,277,000 133,322,000	2,328,424,000 2,060,825,000 134,277,000 133,322,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.136-Makassar II) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	28,000 2,000 2,000	32,000 28,000 2,000 2,000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.136-Makassar II) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	173,780,000 12,148,000 12,053,000	197,981,000 173,780,000 12,148,000 12,053,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.136-Makassar II) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	48,834,000 3,303,000 3,282,000	55,419,000 48,834,000 3,303,000 3,282,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.136-Makassar II) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	26,530,000 2,160,000 2,160,000	30,850,000 26,530,000 2,160,000 2,160,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

Rev 22 (POK)

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(427598)

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 13,185,994,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.136-Makassar II)			170,404,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	157,759,000	157,759,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,645,000	12,645,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.136-Makassar II)			23,471,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	22,707,000	22,707,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	444,000	444,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	320,000	320,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.136-Makassar II)			126,011,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	126,011,000	126,011,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.136-Makassar II)			297,220,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	297,220,000	297,220,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.136-Makassar II)			34,160,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	31,952,000	31,952,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,194,000	1,194,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,014,000	1,014,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.136-Makassar II)			171,921,000	RM
	- Uang lembur dan uang makan lembur pegawai	1.0 THN	171,921,000	171,921,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.136-Makassar II)			3,558,919,000	RM
	- Belanja tunjangan kinerja pegawai	1.0 THN	3,558,919,000	3,558,919,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,056,517,000	
A	<i>Operasional Perkantoran</i>			<i>822,011,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.136-Makassar II)			140,287,000	RM
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	48.0 OT	1,530,000	73,440,000	
	- Langganan surat kabar/ majalah	12.0 BLN	211,000	2,532,000	
	- Administrasi bank	1.0 THN	1,315,000	1,315,000	
	- Dukungan kebersihan dan keamanan	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
	- Lisensi aplikasi video conference	12.0 BLN	3,250,000	39,000,000	
	- Penggandaan/ penjiilidan	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.136-Makassar II)			21,924,000	RM
	- Pengiriman surat/ dokumen/ barang	12.0 BLN	1,827,000	21,924,000	

Rev 22 (P0K)

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.136-Makassar II) > Pengelola anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tangan SPM - Bendahara Pengeluaran - Staf Pengelola Keuangan - Staf Pengelola Keuangan > Pengelola PNBPN - Atasan langsung Bendahara Penerimaan - Bendahara Penerimaan - Staf Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara di Wilker - Staf Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara di Wilker > Pengelola SAI - Penanggung jawab - Koordinator - Ketua - Wakil Ketua - Anggota (SAK dan SIMAK BMN)			80,064,000		RM
				59,136,000		
		12.0 OB	1,204,000	14,448,000		
		12.0 OB	1,168,000	14,016,000		
		12.0 OB	500,000	6,000,000		
		12.0 OB	436,000	5,232,000		
		36.0 OB	441,000	15,876,000		
		24.0 OB	148,500	3,564,000		
				15,168,000		
		12.0 OB	428,000	5,136,000		
		12.0 OB	352,000	4,224,000		
		12.0 OB	264,000	3,168,000		
		8.0 OB	330,000	2,640,000		
				5,760,000		
		12.0 BLN	120,000	1,440,000		
		12.0 OB	100,000	1,200,000		
		12.0 OB	80,000	960,000		
		3.0 OB	60,000	180,000		
		36.0 OB	55,000	1,980,000		
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pejabat pengadaan barang/ jasa	12.0 BLN	285,000	3,420,000		RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.136-Makassar II) - ATK - Komputer supplies - Pencetakan/Penggandaan Blangko - Operasional Kantor Wilker - Peralatan Rumah Tangga Kantor			147,282,000		RM
		12.0 BLN	3,573,000	42,876,000		
		12.0 BLN	3,572,000	42,864,000		
		12.0 BLN	2,000,000	24,000,000		
		6.0 BLN	257,000	1,542,000		
		12.0 BLN	3,000,000	36,000,000		
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.136-Makassar II) - Bahan laboratorium uji			92,007,000		RM
		1.0 Thn	92,007,000	92,007,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.136-Makassar II) - Iuran tahunan lembaga inspeksi			1,500,000		RM
		1.0 PKT	1,500,000	1,500,000		

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pemeliharaan personal komputer/ notebook - Pemeliharaan inventaris kantor - Pemeliharaan printer - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan/ maintenance alat laboratorium - Pemeliharaan dan operasional genset - Pemeliharaan conveyor - Pemeliharaan jaringan	61.0 UNIT 93.0 OT 45.0 UNIT 51.0 Unit 1.0 THN 4.0 Unit 1.0 THN 1.0 THN	610,000 80,000 600,000 730,000 169,772,000 7,190,000 5,423,000 22,692,000	335,527,000 37,210,000 7,440,000 27,000,000 37,230,000 169,772,000 28,760,000 5,423,000 22,692,000	RM
B	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			884,788,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.136-Makassar II) - Langganan Jasa internet	12.0 BLN	28,000,000	336,000,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.136-Makassar II) - Langganan Listrik	12.0 BLN	33,969,000	407,628,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.136-Makassar II) - Langganan Telepon	12.0 BLN	525,000	6,300,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.136-Makassar II) - Langganan air	12.0 BLN	631,000	7,572,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.136-Makassar II) - Sewa ruangan/ gedung untuk kantor Wilker (Pel. Laut Makassar) - Sewa digital signage	1.0 THN 1.0 Pkt	100,000,000 27,288,000	127,288,000 27,288,000	RM
C	<u>Perawatan Kendaraan Bermotor</u>			271,028,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.136-Makassar II) - Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 - Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 - Peralatan perawatan kendaraan	7.0 UNIT 19.0 UNIT 12.0 Bln	985,000 100,000 252,000	6,895,000 1,900,000 3,024,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.136-Makassar II) - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 double gardan - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	6.0 UNIT 1.0 UNIT 19.0 UNIT	30,450,000 39,364,000 1,955,000	182,700,000 39,364,000 37,145,000	RM
D	<u>Perawatan Gedung dan Bangunan</u>			539,256,000	

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(427598)

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 13,185,994,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			539,256,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (1 lantai)	200.0 m2	200,000	40,000,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (2 lantai)	415.0 m2	219,000	90,885,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium	761.0 m2	209,000	159,049,000	
	- Pemeliharaan halaman gedung	1210.0 M2	10,000	12,100,000	
	- Tambah daya listrik	1.0 PKT	66,000,000	66,000,000	
	- Pemeliharaan ruang arsip	1.0 PKT	60,400,000	60,400,000	
E	- Pemeliharaan ruang pelayanan laboratorium	1.0 PKT	110,822,000	110,822,000	
	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja</u>			83,088,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			83,088,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Pakaian dinas pegawai	72.0 STEL	730,000	52,560,000	
F	- Pakaian kerja PPNP	48.0 STEL	636,000	30,528,000	
	<u>Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh</u>			135,110,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>			13,110,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Makanan/ minuman penambah daya tahan tubuh	690.0 OH	19,000	13,110,000	
	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			122,000,000	RM
522191	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Pemeriksaan kesehatan/ medical check up pegawai	48.0 OT	1,500,000	72,000,000	
G	- Peningkatan jiwa korsa dan etos kerja pegawai	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	<u>Pas Bandar Udara</u>			10,100,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			10,100,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Pas orang	50.0 OT	150,000	7,500,000	
H	- Pas kendaraan	13.0 UNIT	200,000	2,600,000	
	<u>Pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu</u>			84,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			84,000,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
I	- Jamuan tamu kedinasan	12.0 BLN	7,000,000	84,000,000	
	<u>Keamanan Kantor, Pengemudi dan Pramu Bakti</u>			1,227,136,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			650,789,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Penghasilan PPNP	159.0 OB	3,671,000	583,689,000	
	- Uang lembur PPNP	3080.0 OJ	13,000	40,040,000	
522191	- Uang makan lembur PPNP	902.0 OK	30,000	27,060,000	
	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			576,347,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Pramubakti / keamanan/ pengemudi	157.0 OB	3,671,000	576,347,000	

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(427598)	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 13,185,994,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	37.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		36,514,000		
	Lokasi : KOTA MAKASSAR					
3987.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	37.0 Orang		36,514,000		
051	Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA			11,688,000	U	
A	Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur			8,844,000		
521211	Belanja Bahan			2,600,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- Konsumsi pembinaan/ motivasi pegawai	52.0 OH	50,000	2,600,000		
522191	Belanja Jasa Lainnya			1,200,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- Honor pembinaan/ motivasi pegawai	2.0 OJ	600,000	1,200,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,044,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	> Temu teknis kepegawaian			5,044,000		
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah)	2.0 OH	530,000	1,060,000		
	- Penginapan	1.0 OH	543,000	543,000		
	- Taksi	2.0 OK	400,000	800,000		
	- Tiket Makassar - Jakarta PP	1.0 OK	2,641,000	2,641,000		
B	Monitoring data kehadiran pegawai			2,844,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2,844,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	- ATK dan komputer suplies	12.0 BLN	237,000	2,844,000		
052	Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional			24,826,000	U	
A	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional			24,826,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24,826,000		PNP
	(KPPN.136-Makassar II)					
	> Uji kompetensi pejabat fungsional			18,588,000		
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) [3 org x 2 hr]	6.0 OH	530,000	3,180,000		
	- Penginapan [3 org x 1 hr]	3.0 OH	696,000	2,088,000		
	- Taksi [3 org x 2 kl]	6.0 OK	400,000	2,400,000		
	- Tiket Makassar - Jakarta PP [3 org x 1 kl]	3.0 OK	3,640,000	10,920,000		
	> Penilaian angka kredit			6,238,000		
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah)	2.0 OH	530,000	1,060,000		
	- Penginapan	1.0 OH	707,000	707,000		
	- Taksi	1.0 OK	789,000	789,000		
	- Tiket Makassar - Jakarta PP	1.0 OK	3,682,000	3,682,000		
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		93,897,000		
	Lokasi : KOTA MAKASSAR					

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(427598)
Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		80,159,000	
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			80,159,000	U
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran			80,159,000	
521211	Belanja Bahan			650,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- ATK dan komputer suplies	1.0 PKT	650,000	650,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			79,509,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	> Rapat koordinasi perencanaan			11,058,000	
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) [2 org x 2 hr]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Penginapan [2 org x 1 hr]	2.0 OH	540,000	1,080,000	
	- Taksi [2 org x 1 kl]	2.0 OK	329,000	658,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP [2 org x 1 kl]	2.0 OK	3,600,000	7,200,000	
	> Rapat kerja teknis BKIPM			27,977,000	
	- Uang Harian	11.0 OH	530,000	5,830,000	
	- Penginapan [3 org x 2 hr]	6.0 OH	790,000	4,740,000	
	- Taksi [2 org x 2 kl]	4.0 OK	189,250	757,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP	5.0 OK	3,330,000	16,650,000	
	> Rapat koordinasi perencanaan dan anggaran			12,000,000	
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) [2 org x 2 hr]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Penginapan [2 org x 1 hr]	2.0 OH	540,000	1,080,000	
	- Taksi [2 org x 2 kl]	4.0 OK	400,000	1,600,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP [2 org x 1 kl]	2.0 OK	3,600,000	7,200,000	
	> Rapat teknis perencanaan			11,200,000	
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) [2 org x 2 hr]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Penginapan [2 org x 1 hr]	2.0 OH	540,000	1,080,000	
	- Taksi [2 org x 2 kl]	4.0 OK	200,000	800,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP [2 org x 1 kl]	2.0 OK	3,600,000	7,200,000	
	> Rekonsiliasi Simak BMN dan SAKPA			17,274,000	
	- Uang Harian (1 hari sebelum, 1 hari sesudah) [2 org x 2 hr x 1 kl]	4.0 OH	515,000	2,060,000	
	- Penginapan [2 org x 1 hr x 2 kl]	4.0 OH	750,000	3,000,000	
	- Taksi PP [2 org x 2 kl]	4.0 OK	181,000	724,000	
	- Tiket Makassar - Jakarta PP [1 org x 3 kl]	3.0 OK	3,830,000	11,490,000	
3987.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		4,270,000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			4,270,000	U
A	Evaluasi dan Pelaporan			4,270,000	
521211	Belanja Bahan			1,042,000	PNP
	(KPPN.136-Makassar II)				
	- Penggandaan dan pelaporan	1.0 pkt	1,042,000	1,042,000	

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(427598)

Rp. 13,185,994,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	12.0 bln	269,000	3,228,000	U
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		9,468,000	
051	Layanan Manajemen Keuangan			9,468,000	
A	Perbendaharaan dan Administrasi Keuangan			9,468,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.136-Makassar II) - ATK dan komputer suplies	12.0 BLN	639,000	7,668,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.136-Makassar II) - Perjalanan pembinaan keuangan	2.0 OK	430,000	860,000	PNP
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.136-Makassar II) - Konsultasi/penyetoran spm/pajak	8.0 OK	117,500	940,000	PNP

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Makassar, 27 Desember 2024

Pt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



MUHAMMAD ZAMRUD, S.Pi, MP
NIP 198011282005021001